

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 km². Selanjutnya sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi penambahan luas wilayah administrasi dan penggabungan kelurahan. Secara astronomis Kota Padang terletak pada koordinat antara 0⁰44' dan 01⁰08' Lintang Selatan serta antara 100⁰05' dan 100⁰34 Bujur Timur. Luas administrasi Kota Padang yang awalnya terdiri dari daratan ditambah dengan wilayah laut seluas 720,00 km² sehingga menjadi 1.414,96 km² atau 3,36 % dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Kota Padang secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pada awalnya wilayah Kota Padang secara administratif terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung, kemudian dimekarkan menjadi 11 kecamatan dengan 193 kelurahan, dan pada era otonomi daerah terjadi penggabungan beberapa kelurahan, menjadi 11 kecamatan dengan 104 kelurahan. Pembagian wilayah Kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.1

Jika dilihat dari luas wilayah Kota Padang menurut kecamatan, Kecamatan Koto Tengah memiliki wilayah yang paling luas yaitu 720 Km² atau 23,42 persen dari luas wilayah Kota Padang sedangkan Kecamatan Padang Barat memiliki luas wilayah yang paling kecil yaitu 7 Km² atau 1,01 persen

Tabel 2. 1
Pembagian Wilayah Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
A.	Wilayah Darat		694,96	100
1.	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50
2.	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37
3.	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45
4.	Padang Selatan	12	10,03	1,44
5.	Padang Timur	10	8,15	1,17
6.	Padang Barat	10	7,00	1,01
7.	Padang Utara	7	8,08	1,16
8.	Nanggalo	6	8,07	1,16
9.	Kuranji	9	57,41	8,26
10.	Pauh	9	146,29	21,05
11.	Koto Tengah	13	232,25	23,42
B.	Wilayah Laut	-	720,00	-
	Kota Padang	104	1.414,96	

Sumber : PDA, BPS Kota Padang 2015

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

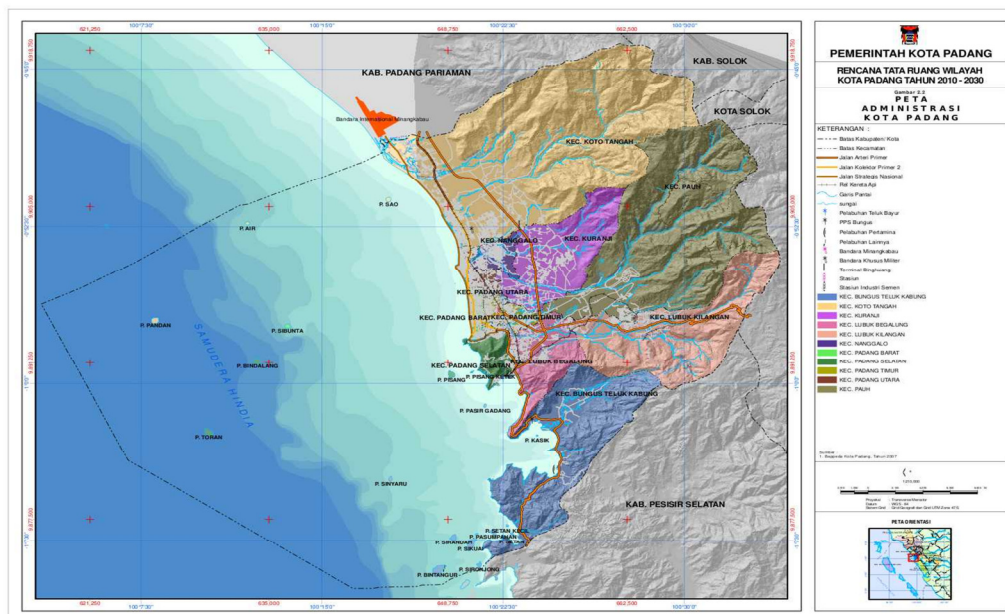
Kota Padang secara geografis terletak di pantai Barat Pulau Sumatera dan secara astronomis terletak pada 100°05'05" BT – 100°34'09" BT dan 00°44'00" LS - 01°08'35" LS, memiliki wilayah pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia, sebagian besar wilayah daratan merupakan daerah berkembang dan pusat kota, wilayah daratan tinggi berada pada lereng Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 486.209 km². Disamping itu, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan dengan 19 pulau kecil, diantaranya Pulau Sikuai dan Pulau Pasumpahan yang merupakan kawasan pariwisata.

Tabel 2. 2
Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kota Padang

No	Nama Pulau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)	Keliling (m)
1	Bintangur	Bungus Kabung Teluk	56,78	3.396,80
2	Sikuai	Bungus Kabung Teluk	48,1	3.198,11
3	Sirandah	Bungus Kabung Teluk	19,18	1.741,11
4	Pasumpahan	Bungus Kabung Teluk	16,90	1.916,01
5	Sibonta	Bungus Kabung Teluk	13,18	1.423,56
6	Sironjong	Bungus Kabung Teluk	11,04	1.381,15
7	Sinyaru	Bungus Kabung Teluk	7,90	1.139,06
8	Setan	Bungus Kabung Teluk	7,81	1.331,92
9	Setan Kecil	Bungus Kabung Teluk	3,33	692,47
10	Kasik	Bungus Kabung Teluk	1,73	483,82
11	Ular	Bungus Kabung Teluk	1,38	594,98
12	Toran	Padang Selatan	33,67	2.277,23
13	Bindalang	Padang Selatan	27,06	1.996,47
14	Pisang	Padang Selatan	26,19	2.007,05
15	Pandan	Padang Selatan	24,32	1.821,77
16	Pasir Gadang	Padang Selatan	4,91	891,71
17	Pisang Ketek	Padang Selatan	3,02	846,43
18	Sao	Koto Tengah	12,46	1.380,79
19	Air	Koto Tengah	7,09	990,20

Sumber: PDA 2015, BPS Kota Padang

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kota Padang



Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kota Padang memiliki ketinggian 0 –1.853 meter dari permukaan laut, dengan topografi bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata 40%. Topografi dan Ketinggian Wilayah Kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Kondisi Topografi dan Ketinggian Kota Padang

No	Kondisi topografi	Luas	
		(Ha)	Persen
I	Ketinggian		
1	0-25 m dpl	15.898,68	22,88
2	25-100 m dpl	6.479,39	9,32
3	100-500 m dpl	19.324,56	27,81
4	100-1.000 m dpl	15.787,23	22,72
5	>1.000 m dpl	12.006,13	17,28
Jumlah		69.496,00	100,00
II	Kelerengan		
1	Datar (0-2%)	16.379,82	23,57
2	Bergelombang (3-15%)	5.510,93	7,93

3	Curam (16-40%)	13.219,48	19,02
4	Sangat curam (>40%)	34.385,77	49.48
Jumlah		69.496,00	100,00

Sumber: Profil Kota Padang Tahun 2015, Bappeda Kota Padang

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa luas wilayah Kota Padang terbesar berada pada ketinggian antara 10-500 m dpl dan luas wilayah terbesar pada kelerengan terbesar pada tingkat kelerengan sangat curam yakni lebih dari 40% atau sebesar 34.385,77 Ha.

Daratan Kota Padang berdasarkan ketinggian kecamatan diduduki paling tinggi oleh kecamatan Lubuk Kilangan yakni pada ketinggian 23-1.853 m dan paling rendah pada kecamatan Padang barat yakni pada ketinggian 0-8 m. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Ketinggian Wilayah Daratan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian (m)
1.	Bungus Teluk Kabung	0-850
2.	Lubuk Kilangan	25-1.853
3.	Lubuk Begalung	8-400
4.	Padang Selatan	0-322
5.	Padang Timur	4-10
6.	Padang Barat	0-8
7.	Padang Utara	0-25
8.	Nanggalo	3-8
9.	Kuranji	8-1000
10.	Pauh	10-1.600
11.	Koto Tangah	0-1.600
Kota Padang		0-1853

Sumber: Profil Kota Padang Tahun 2015, Bappeda Kota Padang

2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, bantuan vulkanik dan intuisi serta batuan sedimen dan betamorf. Aliran yang tidak teruraikan (Qtau) mencakup seluruh kawasan Bukit Barisan yang ada di wilayah Kota Padang dan sekitar kawasan gunung Padang serta Bukit Air Manis. Aluvium (Qal) yang menyebar dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah wilayah Kota Padang umumnya terdiri dari Lanau, Lempeng, Pasir Lempung, Lempeng Pasiran, dan Bongkahan Batuan Andesit. Kipas Aluvium (Qf) terlihat pada singkapan bagian bawah lereng-lereng pegunungan dan perbukitan Bukit Barisan dan sebagian bersebelahan dengan kipas aluvium setempat yang terdapat di Bukit Air Manis. Sebagian besar menutupi perbukitan sepanjang pantai bagian selatan wilayah Kota Padang mulai dari Teluk Nibung hingga keperbukitan Labuan Tarok Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Jenis batuan geologi yang terdapat di Kota Padang terbanyak pada jenis batuan Aluvium yakni seluas 21.566,89 Ha dan terkecil pada jenis batuan formasi palepat yakni seluas 0,001 Ha. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Jenis Batuan Geologi yang terdapat di Kota Padang

No	Jenis Batuan (Litologi)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvium	21.566,89	31,03
2	Batuan Gunung Api	34.972,34	50,32
3	Batuan Intrusi	1.337,81	1,93
4	Batuan Metamorf	1.189,56	1,71
5	Batu Kapur	1.158,56	1,67
6	Formasi Palepat	0,001	0,00
7	Formasi Painan	9.270,83	13,34

Sumber: Profil Kota Padang 2015, Bappeda Kota Padang

Wilayah Kota Padang terdiri dari 7 jenis tanah, jenis tanah terluas yakni berjenis latosol seluas 32.453,15 Ha dan terkecil jenis tanah Organosol dan Glei Humus yakni seluas 688,30 Ha. secara rinci jenis tanah di wilayah Kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6
Jenis Tanah di Kota Padang

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	15.948,07	22,95
2	Andosol	5.623,77	8,09
3	Komplek Podsolik Merah Kuning Latosol dan Litosol	10.794,68	15,53
4	Latosol	32.453,15	46,70
5	Latosol dan Podsolik Merah Kuning	3.027,21	4,36
6	Organosol dan Glei Humus	688,30	0,99
7	Regosol	960,81	1,38
Kota Padang		69.496,00	100,00

Sumber: Profil Kota Padang Tahun 2015, Bappeda Kota Padang

2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil. Terdapat tidak kurang dari 23 aliran sungai total panjang mencapai 155,40 Km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil) dan 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang.

2.1.1.6 Klimatologi

Kota Padang merupakan daerah beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin Barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Adapun kondisi iklim di Kota Padang sebagai berikut :

- Temperatur : 23⁰c – 32⁰c pada siang hari dan 22⁰c – 28⁰c pada malam hari
- Kelembaban rata-rata : 80 – 85%.
- Curah Hujan rata-rata : 347,5 mm/bulan
- Curah Hujan Tertinggi : 615 mm pada bulan Desember
- Curah Hujan Terendah : 81 mm pada bulan Maret
- Kecepatan angin : 1,6-5,6 knot dan tertinggi 5-40 knot

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Padang dapat dibedakan atas 2 kelompok utama, yaitu (a) lahan sawah sekitar 7,17 % dan lahan non sawah sekitar 92,83 %. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi teknis dan non teknis sedangkan Lahan non sawah sebagian besar merupakan kawasan hutan lebat (54,95%), kebun campuran (21,26%) dan perumahan (10,76).

Pada tabel 2.7 terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir terjadi pergeseran penggunaan lahan di Kota Padang. Luas lahan sawah semakin berkurang sebaliknya Lahan non sawah bertambah luasnya. Luas lahan sawah irigasi non teknis berkurang hampir setengahnya namun luas lahan sawah irigasi teknis tetap dipertahankan. Selain itu tanah kosong dan ladang/tegalan luasnya semakin berkurang karena mulai dimanfaatkan.

Tabel 2. 7
Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang

No	Jenis penggunaan	2012		2013		2014		2015	
		Luas (Km ²)	%	Luas (Km ²)	%	Luas (Km ²)	%	Luas (Km ²)	%
A	Lahan Sawah	5.014,25	100,00	4.996,95	100,00	4.982,19	100,00	4.978,92	100
1	Sawah Irigasi Teknis	4.934,00	98,40	4.934,00	98,74	4.934,00	99,03	4.934,00	99,09
2	Sawah Non Irigasi Teknis	80,25	1,60	62,95	1,26	48,19	0,97	44,92	0,90
B	Lahan Non Sawah	64.481,75	100	64.499,05	100	64.513,81	100	64.523,08	100
1.	Tanah Perumahan	6.696,27	10,40	6938,50	10,76	6972,35	10,76	6989,41	10,83
2.	Tanah Perusahaan	261,06	0,40	261,06	0,40	261,06	0,40	261,06	0,40
3.	Tanah Industri	702,25	1,09	702,25	1,09	702,25	1,09	702,25	1,08
4.	Tanah Jasa	715,32	1,11	715,32	1,11	715,32	1,11	715,25	1,10
5.	Ladang/Tegalan	952,45	19,88	940,38	1,46	940,27	1,46	939,15	1,45
6.	Perkebunan Rakyat	2.147,50	1,46	2.147,50	3,33	2.147,50	3,33	2.147,50	3,32
7.	Kebun Campuran	13.829,92	21,26	13.709,45	21,26	13.709,45	21,26	13.697,00	21,22
8.	Kebun Sayuran	1.343,00	2,08	1.343,00	2,08	1343,00	2,08	1343,00	2,08
9.	Peternakan	27,86	0,04	26,83	0,04	26,83	0,04	26,83	0,04
10.	Kolam Ikan	100,80	0,16	100,80	0,16	100,80	0,16	100,80	0,15
11.	Danau Buatan	2,25	0,003	2,25	0,003	2,25	0,003	2,25	0,003

No	Jenis penggunaan	2012		2013		2014		2015	
		Luas (Km ²)	%	Luas (Km ²)	%	Luas (Km ²)	%	Luas (Km ²)	%
12.	Tanah kosong	15,26	0,02	10,62	0,02	7.19	0,02	3,89	0,006
13.	Tanah Kota	16.00	0,02	16.00	0,02	16.00	0,02	16,00	0,02
14.	Semak	1.498,23	2,32	1498,83	2,32	1.496,19	2,32	1.496,24	2,31
15.	Rawa/Hutan Mangrove	120.00	0,19	120.00	0,19	120.00	0.19	120,00	0,18
16.	Jalan Arteri dan Kolektor	135.00	0,21	135.00	0,21	135.00	0,21	135,00	0,20
17.	Hutan Lebat	35.448.00	54.96	35.448.00	54.96	35.448.00	54.95	35.448,00	54,93
18.	Sungai dll	379,45	0,59	379.45	0,59	379.45	0,59	379,45	0,58
Jumlah Luas Lahan		69.496	100	69.496	100	69.496	100	69.502	100

Sumber: PDA 2016, BPS Kota Padang

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Rencana Struktur Ruang Kota Padang

Rencana Sistem Pusat-pusat Struktur Ruang Kota Padang direncanakan sebagai berikut:

1) Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota 10 Tahun Pertama

a. Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota berada di Kawasan Pusat Kota Lama yang mencakup wilayah Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan. Fungsi Pusat Pelayanan adalah sebagai pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.

Dalam 10 tahun pertama pusat pelayanan ini akan dikembangkan dalam kaitannya untuk pemulihan perekonomian Kota Padang pasca bencana gempa bumi 30 September 2009. Skala pelayanan mencakup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan regional.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota

b.1. Sub Pusat Pelayanan Lubuk Buaya

Mencakup kawasan di bagian utara Kota Padang dan termasuk kawasan sekitar Bandara Internasional Minangkabau. Berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian), dan pusat pelayanan transportasi regional dengan dukungan Terminal Tipe A.

b.2. Sub Pusat Pelayanan Aie Pacah

Mencakup kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Padang, kawasan pusat olahraga, dan kawasan pendidikan tinggi, pusat pelayanan ekonomi (pasar ternak, hotel, pertokoan), pusat kegiatan sosial-budaya (arena pekan raya, perumahan, *sport center* dan sarana sosial lainnya),

dengan jangkauan pelayanan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan regional.

b.3.Sub Pusat Pelayanan Bandar Buat

Mencakup kawasan Lubuk Begalung sampai Indarung. Berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian), dan pusat pelayanan transportasi Kota Padang dan wilayah bagian timur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Terminal Tipe B.

b.4.Sub Pusat Pelayanan Bungus

Mencakup kawasan di bagian selatan Kota Padang. Berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi laut dalam skala nasional dan internasional, pusat pelayanan industri perikanan dan kemaritiman, pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi perikanan), dan pusat pelayanan transportasi darat wilayah bagian selatan dengan dukungan Terminal Tipe B.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan meliputi :

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Anak Air
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Lubuk Minturun
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunung Sarik
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Ketaping

2) Rencana Pusat Pelayanan 10 Tahun Kedua

a. Pusat Pelayanan Kota

Dalam kaitannya dengan pengembangan Metropolitan Padang, upaya mitigasi bencana (memecah konsentrasi masa bangunan dan konsentrasi penduduk), pemerataan pengembangan kota serta pengendalian pergerakan dalam kota maka pada 10 tahun kedua akan didorong pengembangan pusat-pusat kota ke arah utara, timur dan selatan.

Berdasarkan posisi geografis Kota Padang dan mempertimbangkan kebijakan RTRW Provinsi untuk menjadikan Kota Padang sebagai Kota Inti dalam kawasan Metropolitan Padang serta maka sistem pelayanan pusat pelayanan kota akan dikembangkan di selatan, timur dan utara kota.

a.1. Pusat Kota di Bagian Selatan

Pusat Kota di bagian selatan akan dikembangkan untuk pengembangan transportasi pelabuhan barang dan penumpang, pelabuhan perikanan, industri dan pergudangan. Selain itu juga dikembangkan fasilitas-fasilitas pelayanan yang akan melayani perkembangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pusat Pelayanan kota di bagian selatan akan dikembangkan di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Pelabuhan Perikanan Bungus yang meliputi :

Kawasan Minapolitan Bungus (sebagai pusat koleksi dan distribusi perikanan dan peternakan serta pertanian hortikultura berfungsi sebagai pusat pelayanan industri perikanan dan kemaritiman dengan dukungan Terminal Tipe B.

- Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur yang terintegrasi dengan kawasan pergudangan, berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi laut dalam skala nasional dan internasional.
- Kawasan industri dan pergudangan

a.2.Pusat Pelayanan Kota di Bagian Timur

Pusat Pelayanan kota di bagian timur akan dikembangkan untuk pengembangan pendidikan tinggi dan perdagangan dan jasa skala regional, pemerintahan, pusat olahraga dan rekreasi, rumah sakit.

Selain itu juga dikembangkan fasilitas-fasilitas pelayanan yang akan melayani perkembangan di Kabupaten Solok. Pusat Pelayanan kota di bagian timur akan dikembangkan di Kawasan Aie Pacah-Bandar Buat-Indarung yang meliputi :

- Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Padang
- Kawasan Pusat Olahraga dan Rekreasi;
- Kawasan Pendidikan Tinggi;
- Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan skala pelayanan regional khususnya pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian);
- Kawasan Industri Semen Padang;
- Pusat Pelayanan Transportasi Kota dan wilayah bagian timur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Terminal Tipe B.

a.3. Pusat Pelayanan Kota di Bagian Utara

Pusat Pelayanan kota Utara akan dikembangkan untuk pengembangan transportasi terminal AKAP, bandar udara, serta perdagangan dan jasa regional. Selain itu juga dikembangkan fasilitas-fasilitas pelayanan yang akan melayani perkembangan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota di bagian utara ini sejalan dengan rencana pengembangan pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman di Simpang Duku.

Pusat Pelayanan Kota di bagian utara akan dikembangkan di kawasan Lubuk Buaya yang meliputi :

- Pelayanan transportasi regional (terminal AKAP) yang terintegrasi dengan Bandar Udara Internasional Minangkabau.
- Perdagangan dan jasa dengan fungsi sebagai pusat koleksi-distribusi produksi pertanian.

a.4. Pusat Pelayanan Kota Lama

Pusat Pelayanan Kota Lama meliputi Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Barat yang didominasi oleh kegiatan dengan skala pelayanan kota atau lokal. Dalam jangka panjang, pusat kota di Pasar Raya dan

sekitarnya (Kecamatan Padang Selatan, Padang Timur dan Padang Barat) akan difungsikan untuk pelayanan ekonomi skala kota.

Agar vitalitas ekonomi di dalam kawasan pusat pelayanan kota lama tetap terjaga maka perlu dilakukan revitalisasi dengan memasukkan fungsi-fungsi baru yang dapat mensubstitusi/menggantikan kegiatan kegiatan perdagangan dengan skala pelayanan regional ke pusat kota.

Fungsi-fungsi baru yang akan dikembangkan di kawasan Pusat Kota Padang Lama adalah: pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.

b. Sub Pusat Kota adalah Pusat Pelayanan Ekonomi, Sosial dan/ atau Administrasi yang melayani Sub Wilayah Kota.

Rencana pengembangan Sub Pusat Kota di Kota Padang meliputi :

b.1. Sub Pusat Kota Lubuk Begalung

Lubuk Begalung akan dikembangkan dengan thema perdagangan dan jasa dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Padang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, sebagian wilayah Kecamatan Pauh dan sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan.

b.2. Sub Pusat Kota Sungai Pisang

Sungai Pisang akan dikembangkan dengan tema pusat pelayanan kegiatan pariwisata alam dan wisata agro dengan skala pelayanan Kota Padang dan regional. Selain itu juga akan dikembangkan sebagai Sub Pusat Kota dengan wilayah pelayanan sebagian wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

b.3. Sub Pusat Kota Limau Manis

Limau Manis akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan kegiatan pendidikan tinggi dan penelitian, pusat kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pusat kegiatan studi dan kajian sosial-budaya dengan skala pelayanan regional. Selain itu juga akan dikembangkan sebagai Sub Pusat Kota dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kuranji, dan sebagian wilayah Kecamatan Pauh.

b.4. Sub Pusat Kota Gunung Padang

Berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pariwisata yang ter-integrasi dengan rencana pengembangan kawasan wisata Pelabuhan Muaro, Kawasan Kota Tua dan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.

b.5. Sub Pusat Kota Indarung

Berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan industri pengolahan semen dan serta kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala bagian wilayah kota dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Lubuk Kilangan.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah ruang yang dikembangkan untuk menampung fasilitas pelayanan yang melayani kebutuhan penduduk dalam lingkup lingkungan/ kawasan. Jenis-jenis kegiatan yang masuk dalam kategori ini sebagian besar berhubungan dengan kegiatan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari (pokok) penduduk. Selain itu juga jangkauan pelayanan masing-masing pusat pelayanan kawasan terhadap wilayah pelayanannya.

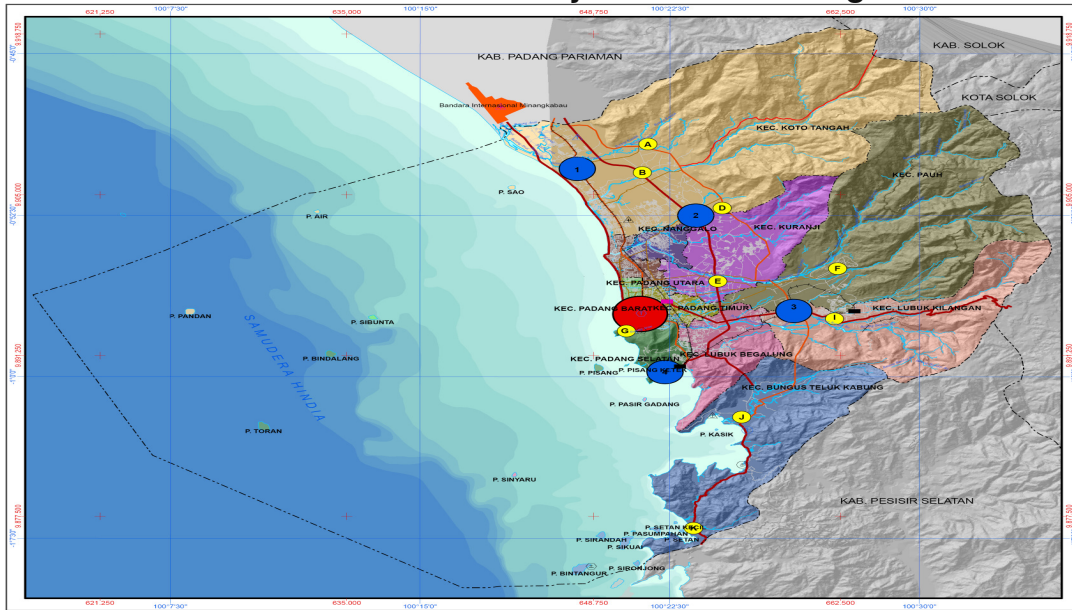
Pusat Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan meliputi :

1. Pusat Pelayanan Lingkungan Anak Ai
2. Pusat Pelayanan Lingkungan Lubuk Minturun

3. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunung Sarik
4. Pusat Pelayanan Lingkungan Ketaping

Gambar 2. 2

Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kota Padang 10Tahun Pertama

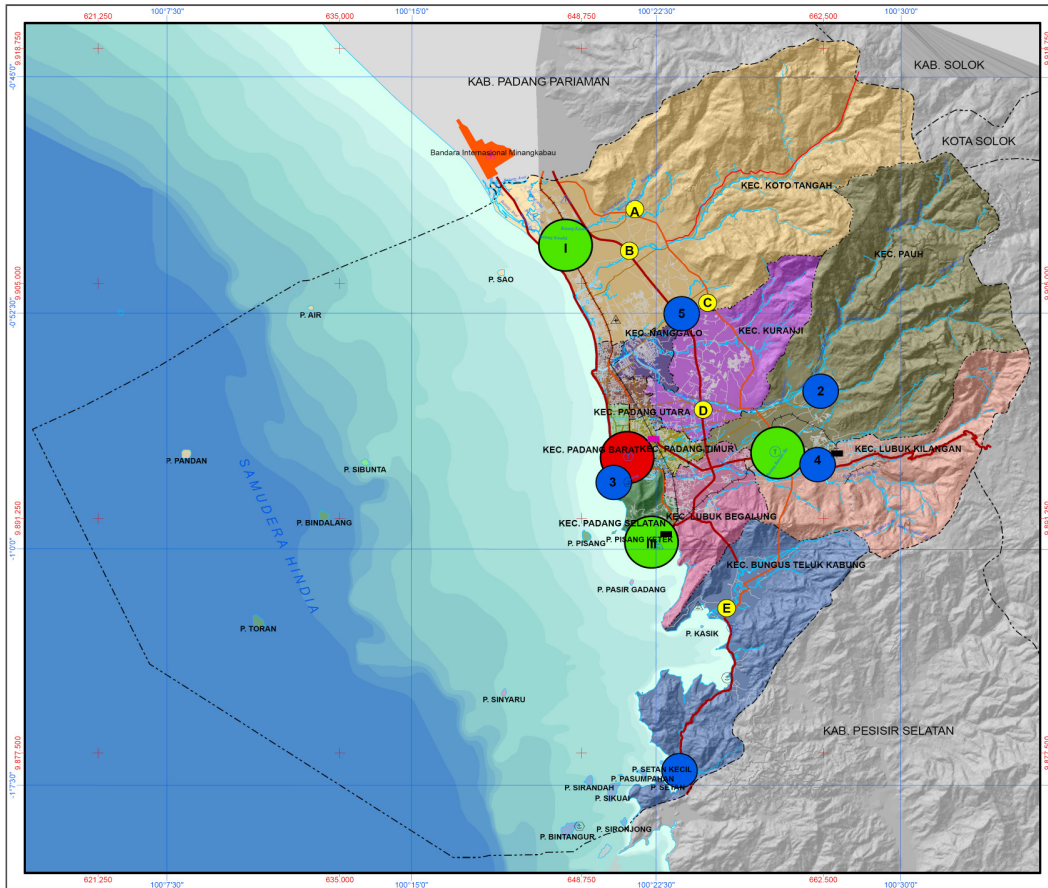


KETERANGAN :

- Batas Kabupaten/ Kota
- - - - Batas Kecamatan
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Kolektor Primer
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- ++ Rel Kereta Api
- Garis Pantai
- sungai
- ▲ Pelabuhan Teluk Bayur
- ▲ PPS Bungus
- ⊕ Pelabuhan Khusus Pertamina
- ⊕ Pelabuhan Lainnya
- ▲ Bandara Internasional Minangkabau
- ▲ Bandara Khusus Militer
- Stasiun

- Stasiun Khusus Industri Semen
- ▲ Terminal Tipe A
- ⊕ Terminal Tipe B
- ⊕ Terminal Tipe C
- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota
 1. Lubuk Buaya
 2. Air Pacah
 3. Bandar Buat
 4. Teluk Bayur
- Pusat Pelayanan Lingkungan
 - A. Anak Air
 - C. Lubuk Minturun
 - D. Gunung Sariak
 - E. Ketaping
 - F. Limau Manis
 - G. Gunung Padang
 - I. Indarung
 - J. Bungus
 - K. Sungai Pisang

Gambar 2. 3
Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kota Padang 10 Tahun
Kedua



KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| ----- | Batas Kabupaten/ Kota | ■ | Stasiun Khusus Industri Semen |
| - . - . - | Batas Kecamatan | △ | Terminal Tipe A |
| — | Rencana Jalan Arteri Primer | ⊕ | Terminal Tipe B |
| — | Rencana Jalan Kolektor Primer | ⊕ | Terminal Tipe C |
| — | Rencana Jalan Arteri Sekunder | ● | Pusat Pelayanan Primer |
| — | Rencana Jalan Kolektor Sekunder | ● | I. Lubuk Buaya |
| —+—+— | Rel Kereta Api | ● | II. Bandar Buat |
| ~ | Garis Pantai | ● | III. Teluk Bayur |
| ~ | sungai | ● | Pusat Pelayanan Sekunder |
| ⚓ | Pelabuhan Teluk Bayur | ● | Sub Pusat Pelayanan Kota |
| ⚓ | PPS Bungus | ● | 1. Sungai Pisang |
| ⚓ | Pelabuhan Khusus Pertamina | ● | 2. Limau Manis |
| ⚓ | Pelabuhan Lainnya | ● | 3. Gunung Padang |
| ✈ | Bandara Internasional Minangkabau | ● | 4. Indarung |
| ✈ | Bandara Khusus Militer | ● | 5. Air Pacah |
| ■ | Stasiun | ● | Pusat Pelayanan Lingkungan |
| | | ● | A. Anak Air |
| | | | B. Lubuk Minturun |
| | | | C. Gunung Sariak |
| | | | D. Ketaping |
| | | | E. Bungus |

2.1.2.2 Rencana Pola Ruang Kota Padang

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun;
- d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Padang dirumuskan berdasarkan :

- a. Optimasi dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota Padang yang relatif terbatas untuk pengembangan kegiatan budi daya karena luasnya areal Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata serta kerawanan terhadap bencana;
- b. Kelestarian lingkungan hidup yang harus dijaga mengingat luasnya Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Upaya mitigasi bencana mengingat sebagian besar wilayah Kota Padang tergolong rawan terhadap bencana;
- d. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Padang sampai tahun 2030;
- e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan;
- f. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan;

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Padang sampai tahun 2030 mencakup :

1) Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, yang terdiri dari :

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya
- Kawasan perlindungan setempat
- Ruang terbuka hijau
- Kawasan cagar budaya
- Kawasan rawan bencana

a) Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata

Hutan lindung di Kota Padang berdasarkan RTRW Kota Padang seluas kurang lebih 12.850 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Sedangkan Hutan suaka alam wisata seluas kurang lebih 23.655 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Bungus Teluk

Hutan lindung dan hutan suaka alam wisata dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata terbatas dan kegiatan penelitian dengan tetap mempertahankan kelestariannya

b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang harus dibebaskan dalam upaya untuk memberikan perlindungan pada objek khusus yang ada. Di wilayah Kota Padang, kawasan perlindungan setempat diarahkan untuk sempadan sungai-sungai besar beserta anak sungainya serta sempadan pantai di sepanjang Pantai Padang. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030 dijelaskan bahwa :

- Sungai yang tidak melalui kawasan perumahan ditetapkan sebesar 50 meter.
- Sungai yang melewati kawasan perumahan ditetapkan sebesar 15 meter yang juga difungsikan sebagai areal untuk pembangunan jalan inspeksi.

Sempadan sungai ditetapkan di sepanjang sungai-sungai utama yang memiliki DAS sebagai berikut :

- a. Batang Kandis
- b. Batang Air Dingin
- c. Batang Tabing
- d. Batang Baung Panjalinan
- e. Batang Balimbing;
- f. Batang Kuranji;
- g. Batang Muara;
- h. Batang Kanal;
- i. Batang Arau;
- j. Batang Jirak.
- k. Batang Timbulun
- l. Batang Sarasah

Sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
- daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter.

Sempadan pantai ditetapkan di seluruh kecamatan yang memiliki wilayah pantai sebagai berikut :

- a. Kecamatan Koto Tengah;
- b. Kecamatan Padang Utara;
- c. Kecamatan Padang Barat;

- d. Kecamatan Padang Selatan; dan
- e. Kecamatan Bungus Teluk Kabung

c) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

Ruang Terbuka Hijau meliputi:

- a. RTH taman kota dikembangkan di seluruh kecamatan untuk meningkatkan keindahan dan keasrian kota meliputi Taman Kecamatan, Taman Kelurahan dan Taman Burung
- b. RTH sempadan pantai dikembangkan di sepanjang Pantai Padang
- c. RTH sempadan sungai dikembangkan di sempadan sungai besar
- d. RTH pertanian seluas 4.119 Ha yang tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung
- e. RTH sabuk hijau (*green belt*) yang tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung
- f. RTH pemakaman
 - TPU untuk pelayanan bagian utara kota direncanakan di Kecamatan Koto Tengah;
 - TPU untuk pelayanan di bagian timur kota direncanakan di Kecamatan Pauh;
 - TPU untuk pelayanan bagian selatan kota direncanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan
 - TPU di setiap kecamatan dikembangkan dengan luas yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kepadatan penduduknya

d) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan lindung cagar budaya ditetapkan di Kawasan Pondok dan Kawasan Muaro di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan.

Tujuan penetapan kawasan lindung cagar budaya adalah:

- a. menjaga kelestarian kawasan bersejarah dan bangunan bersejarah dan
- b. membentuk citra kota berdasarkan potensi sejarah.

Kawasan lindung cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial budaya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya.

e) Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meliputi:

- a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi;
- b. kawasan rawan banjir; dan
- c. kawasan rawan bencana geologi.

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah:

- a. Kecamatan Koto Tengah;
- b. Kecamatan Nanggalo;
- c. Kecamatan Padang Utara;
- d. Kecamatan Padang Barat;
- e. Kecamatan Padang Timur;
- f. Kecamatan Padang Selatan; dan
- g. Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan rawan terjadi genangan air akibat kondisi morfologi tanah pada waktu hujan atau akibat luapan air sungai. Kawasan rawan banjir berada di sebagian Kecamatan Koto Tengah dan sebagian Kecamatan Nanggal

Kawasan rawan bencana geologi meliputi:

- a. ruang yang diindikasikan berada pada jalur patahan;
- b. kawasan rawan longsor dan gerakan tanah; dan
- c. kawasan rawan likuifaksi.

Kawasan rawan bencana likuifaksi meliputi:

- a. Kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan tinggi terletak di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat;
- b. Kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan sedang terletak di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Padang Timur; dan
- c. Kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan rendah terletak di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung.

2) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya, yang terdiri dari :

a) Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan meliputi :

- a. Pengembangan perumahan kepadatan tinggi dikembangkan di kawasan pusat kota yang meliputi :
 - Kecamatan Padang Utara;
 - Kecamatan Padang Barat;
 - Kecamatan Padang Timur; dan
 - Kecamatan Padang Selatan.
 - Kecamatan Nanggalo

- b. Pengembangan perumahan kepadatan sedang; pengembangannya ditetapkan pada :
 - Kecamatan Koto Tengah; dan
 - Kecamatan Kuranji;
- c. Pengembangan perumahan kepadatan rendah pengembangannya ditetapkan pada :
 - sekitar kawasan lindung di Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Kuranji; dan
 - kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami.
- d. Pengembangan perumahan nelayan dikembangkan di kawasan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

b) Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dikembangkan di:

- a. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala regional yang sudah tumbuh dikembangkan di pusat kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur;
- b. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional di Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah; dan
- c. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional di Bandar Buat.

c) Kawasan Perkantoran Pemerintah

Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah kota meliputi :

- a. Perkantoran pemerintah provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu di koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman

- b. Perkantoran pemerintah kota dikembangkan secara terpusat di Air Pacah
- c. Perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan dikembangkan tersebar pada pusat-pusat kecamatan dan kelurahan.

d) Kawasan Industri dan Pergudangan

- Pengembangan kawasan industri direncanakan di Kecamatan Lubuk Begalung. Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung ini diintegrasikan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.
- Pengembangan industri perikanan sebagai pendukung Minapolitan diarahkan di Bungus. Pengembangan Minapolitan Bungus diintegrasikan dengan pelabuhan pendaratan ikan Muara Anai dan pelabuhan perikanan Bungus

e) Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi.

Pengembangan kawasan wisata alam meliputi:

- a. Kawasan Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tengah;
- b. Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tengah
- c. Kawasan Gunung Padang dan AirManih di Kecamatan Padang Selatan;
- d. Kawasan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- e. Kawasan sepanjang Pantai Padang;
- f. Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Lubuk Peraku dan
- g. Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang.

Pengembangan kawasan wisata sejarah meliputi :

- a. Kawasan cagar budaya kota lama Pondok dan Muaro Kecamatan Padang Selatan;

- b. Kawasan wisata sejarah di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat; dan
- c. Kawasan cagar budaya nagari adat tradisional di Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Pengembangan wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

a) Kawasan Pusat Olahraga dan Rekreasi; Kawasan pusat olah raga dan rekreasi diarahkan di Air Pacah dan diintegrasikan dengan pengembangan pusat pemerintahan kota dan kawasan pendidikan tinggi.

b) Ruang Evakuasi Bencana; Ruang evakuasi bencana bertujuan untuk memberikan ruang yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara pada saat terjadi bencana.

Lokasi ruang evakuasi bencana meliputi:

- a. Kawasan Indarung, Lapangan Bola Kaki Cengkeh, Lapangan Balap Sepeda, Lapangan Golf, Lapangan Lemdadika Padang Besi, Lapangan PT. Semen Padang;
- b. Kawasan Univeritas Andalas, Limau Manis, Lapangan Kampung Dalam, Lapangan Unand, Balai Bahasa Unand, Balai Diklat Dinas Sosial Provinsi, Diklat BRI, SMA 9, SMA 15, SDN 2 Cupak Tengah, SMPN 14, SMAKPA, Mesjid SMAKPA, Auditorium Unand, Mesjid Unand, Pusat Kegiatan Mahasiswa Unand;
- c. Kawasan Durian Tarung, Lapangan Durian Tarung, Lapangan Kuranji, SDN Kampung Kelawi, Mesjid Jamiatul Huda, Kantor Pengadilan Agama, SDN 19 Pasar Ambacang Durian Tarung, MTsN Durian Tarung, MAN 1 Durian Tarung, Mesjid Raya Durian Tarung, Mesjid Simpang Koto Tinggi, SDN 9 Korong Gadang, SMPN 28, Mesjid Al Ikhlas, Mesjid Mujahidin;

- d. Kawasan Balai Baru, Lapangan Masjid Padi, SDN 22, MTsN, Masjid Nurul Hidayah, Masjid Nurul Ikhsan, Komplek Perumnas Belimbing, Balai Kegiatan Sejarah, Masjid taqwa Kampung Tanjung, Masjid Al Hidayah Gunung Sariak, SD 02 Gunung Sariak, SMU PGRI 4 Balai Baru, SMUN 15, SMPN 18, Pusat Olahraga Pelajar (PPLP), Universitas Baiturrahmah By Pass;
- e. Kawasan Lubuk Minturun, Lahan sepanjang jalan baru Solok, Balai Benih Induk Holtikultura, lahan perumahan Bumi Lareh Permai, SD 25 Koto Panjang, MTsN Koto Tengah, Masjid Nurul Yakin, SMPN Air Dingin, Mushallah Hamba Allah, MAN 3 Balai Gadang, SD 39 Tanjung Aur, Masjid Muhammadiyah, Masjid Nurzikhillah, SD 12 Sungai Lareh, Masjid Darussolihin, SMPN 22 Sungai Lareh, Masjid Al Iman, SD 29 Gunung Sarik;
- f. Kawasan Sungai Bangek, lahan sepanjang Jalan By Pass, SDN 21 Sungai Bangek, Masjid Al Ikhlas, SDN 37 Sungai Bangek, Masjid Simpang Pulai, SDN 26 Parak Buruk; dan
- g. Kawasan Anak Air, lahan-lahan masyarakat, sepanjang Jalan By Pass.

c) Peruntukan Lainnya

- a. Kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Koto Tengah
- b. Kawasan perkebunan, diarahkan Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung
- c. Kawasan pertambangan diarahkan Kecamatan Lubuk Kilangan, Koto Tengah, Kuranji, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung dan Pauh yang meliputi kawasan pertambangan batu kapur, tanah liat, silika dan bahan tambang lainnya.
- d. Kawasan pertahanan meliputi :
 - Pangkalan Angkatan Udara Tabing; dan
 - Pangkalan Utama Angkatan Laut di Bukit Peti-peti Teluk Buo.

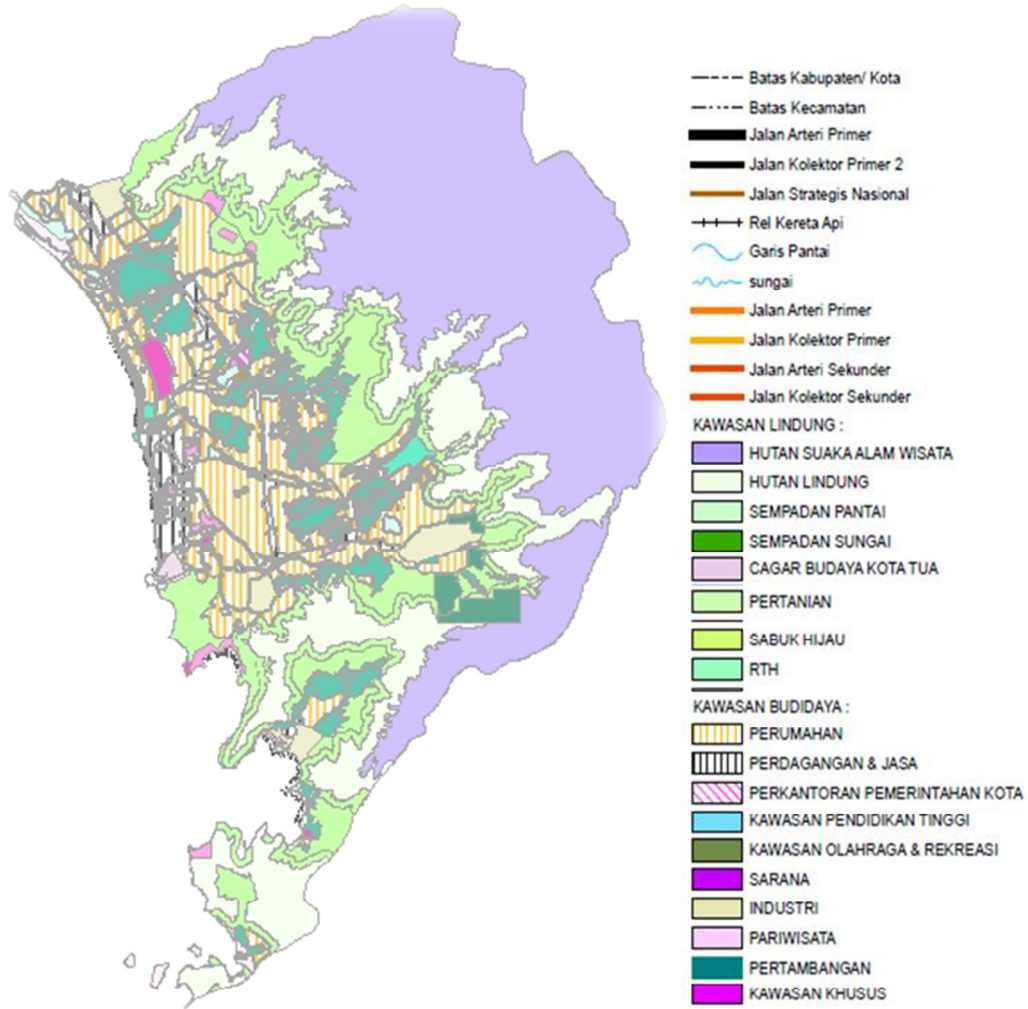
- Kawasan khusus untuk Lantamal (pelabuhan)
 - Kawasan Pertahanan di Guo Kecamatan Kuranji
- e. Kawasan laut dan pulau-pulau kecil meliputi pulau-pulau kecil beserta perairan laut yang melingkupinya, termasuk udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengembangan pola ruang laut meliputi zona pemanfaatan umum, zona konservasi, zona pemanfaatan khusus dan zona alur.

Tabel 2. 8
Rencana Peruntukan Lahan Kota Padang
Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030

No.	Rencana Peruntukkan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
A.	KAWASAN LINDUNG	52.669,32	75,79%
1	Hutan Lindung	10.995,5	15,82%
2	Hutan Suaka Alam Wisata	25.611,4	36,85%
4	Sungai	367,75	0,53%
5	Cagar Budaya Kota Tua Pondok-Muaro	100,01	0,14%
6	RTH Sempadan Pantai	38,56	0,06%
7	RTH Sempadan Sungai	24,00	0,03%
8	RTH Pertanian Perkotaan	4.119	5,93%
9	RTH Taman	138,33	0,20%
10	RTH Tempat Pemakam Umum	19,00	0,03%
11	RTH Sabuk Hijau	11.255,77	16,20%
B.	KAWASAN BUDI DAYA	16.826,68	24,21%
1	Perumahan	10.768,74	15,50%
2	Kawasan Pusat Olahraga & Rekreasi	137,52	0,20%
3	Perkantoran Pemerintahan Kota	60,00	0,09%
4	Kawasan Khusus	297,37	0,43%
5	Industri	183,51	0,26%
6	Sarana	350,21	0,50%
7	Pariwisata	539,65	0,78%
8	Pertambangan	1.137,11	1,64%
9	Kawasan Pendidikan Tinggi	701,46	1,01%
10	Perdagangan & Jasa	2.496,41	3,59%
11	RTNH	154,70	0,22%
Jumlah		69.496,00	100,00%

Sumber : RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030

Gambar 2. 4
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2030



2.1.2.3 Kawasan Strategis Kota Padang

Kawasan strategis Kota Padang meliputi :

- a. kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi;
- b. kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan sosial budaya; dan/atau
- c. kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi terdiri dari :

- a. Kawasan Strategis Teluk Bayur;
- b. Kawasan Strategis Indarung;
- c. Kawasan Bungus
- d. Kawasan Padang Industrial Park (PIP)
- e. Kawasan Strategis Gunung Padang.

Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan sosial budaya terdiri dari :

- a. Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kota; dan
- b. Kawasan Strategis Pusat Kota (lama).

Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana terdiri dari:

- a. Kawasan Strategis Sepanjang Pantai Padang; dan
- b. Kawasan Strategis Taman Hutan Raya Bung Hatta

2.1.2.4 Dinamika Perkembangan Kota Padang

Dinamika perkembangan Kota Padang yang semakin dinamis akan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di Kota Padang. Terjadinya dinamika perkembangan Kota Padang pasti akan memerlukan tempat/ruang dan lokasi, dengan demikian pemanfaatan ruang diperkirakan akan mengalami perubahan. Guna

mengantisipasi dinamika perkembangan Kota Padang yang semakin dinamis, maka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Padang perlu dilakukan secara integral dan menyeluruh.

Adapun dinamika perkembangan Kota Padang yang akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di Kota Padang adalah :

- 1) Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tengah akan menjadi magnet baru perkembangan Kota Padang yang akan mengubah orientasi pemanfaatan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang pada koridor utama Jalan By Pass dan daerah hinlertland/belakang kawasan pusat pemerintahan sehingga penetapan rencana pola ruang sawah di belakang pusat pemerintahan berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030 dirasa tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kota kedepan.
- 2) Rencana pengembangan Kota Baru Mandiri Kota Padang seluas 5.000 Ha yang berada di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. Dengan di rencanakannya Kota Baru Mandiri pada kecamatan tersebut maka pengembangan sarana, prasarana dan utilitas ke kecamatan tersebut akan tinggi yang akan berdampak terhadap terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dan dan intensitas pemanfaatan ruang.
- 3) Pelebaran jalan evakuasi, pembangunan jalan By Pass menjadi 2 jalur 4 lajur, rencana pembangunan jalan tol Padang – Bukittinggi – Riau, akan menimbulkan *multiplier effect* yang positif bagi Kota Padang khususnya dan bagi Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Konsekuensi dari adanya pelebaran dan pembangunan jalan akan menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang terutama pada kiri kanan jalan. Peruntukan lahan sawah yang ditetapkan pada koridor jalan By

Pass tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Kota Padang saat ini.

- 4) Pembangunan jalan Lingkar Timur (lingkar luar) Jalan Padang By Pass – Air Dingin – Lubuk Minturun – Gunung Sariak – Limau Manis – Bandar Buat - Bungus. Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030, rencana jalan lingkar timur berada pada kawasan permukiman, sawah dan sabuk hijau. Untuk kedepannya, dapat diprediksi bahwa peruntukan kawasan permukiman, sawah dan sabuk hijau tidak sesuai dengan perkembangan kota kedepan. Dimana dengan adanya rencana pengembangan jaringan jalan ini maka akan membawa perubahan terhadap pola ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di kiri kanan jalan sehingga perlu ditinjau kembali peruntukan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang yang direncanakan pada kiri kanan jalan tersebut.
- 5) Pembangunan jalan Lingkar Barat (sepanjang pantai) Teluk Bayur – Pantai Air Manis – Muaro – Pasir Jambak – Bandara Internasional Minangkabau.
- 6) Pembangunan Terminal Tipe A di Anak Air dan Pembangunan Terminal Tipe B di di kawasan Bandar Buat untuk wilayah Timur Kota Padang dan di kawasan Bukit Putus untuk wilayah Selatan Kota Padang
- 7) Pembangunan Jalan Nipah – Teluk Bayur

Beberapa kebijakan pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan daerah *hinterland* yang mempengaruhi dinamika perkembangan Kota Padang, yaitu ;

- 1) Kebijakan Pembangunan Nasional menetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang tercantum pada RTRW Nasional. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan peningkatan perekonomian di Kota Padang. Keberadaan Kota Padang di Pesisir Barat Pulau

Sumatera memiliki posisi strategis, ditunjang dengan keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau, menjadikan Kota Padang sebagai pintu gerbang pantai Barat pulau Sumatera.

- 2) Kebijakan Pembangunan Propinsi Sumatera Barat menetapkan Kota Padang sebagai Kota Inti pada pengembangan Padang Metropolitan, sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Perwujudan Padang Metropolitan tidak terlepas dari ketersediaan sarana prasarana penunjang dan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi serta dukungan dari daerah hinterland.

Berikut merupakan pengembangan jaringan dan akses Kota Padang dengan daerah hinterland yang akan pengaruh perubahan terhadap pola ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di Kota Padang.

- 1) Rencana pembangunan *Shortcut* Padang - Solok.
- 2) Rencana pembangunan jalan tol Padang – Bukittinggi – Riau, akan menimbulkan *multiplier effect* yang positif bagi Kota Padang khususnya dan bagi Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Selanjutnya dalam RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, disebutkan bahwa salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah kota Padang 20 tahun mendatang adalah Kota Padang sebagai Kota inti Metropolitan Padang dan wilayah sekitarnya. Perwujudan Kota Padang sebagai Metropolitan tertuang dalam dokumen perencanaan wilayah dan pembangunan pada tingkat pusat, provinsi dan Kota. Pengembangan Kota Padang sebagai Kota inti Metropolitan diprioritaskan melalui kerjasama Padang - Lubuk Alung - Pariaman (Palapa) yang strategi dan kerjasama untuk percepatannya telah tertuang kajian Strategi dan Kerjasama Perbatasan dalam rangka Percepatan Padang Metropolitan. Selanjutnya dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019 kawasan metropolitan Palapa ditetapkan sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah perkotaan.

Berdasarkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 – 2030 terkait dengan potensi pengembangan jaringan bebas hambatan yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) dan pasal 15 ayat (1) dan (2) tentang jaringan kereta api trans Sumatera.

Berdasarkan perda RTRW No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 terkait dengan Pengembangan jaringan jalan propinsi pada ruas jalan kawasan strategis wisata nasional meliputi Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang menuju Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan. Memadukan Pengembangan wilayah utara Kabupaten Pesisir selatan dengan wilayah selatan Kota Padang sebagai kawasan minapolitan yang akan mendukung pada pembangunan pertanian perkotaan dan infrastruktur pendukung di kota Padang. Berdasarkan Perda No.1 tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Solok tahun 2012-2031 Pengembangan Jalan pintas (Short Cut) Padang - Solok dan jalur kereta api Padang – Solok dan Pengelolaan kawasan lindung Taman Hutan Raya Bung Hatta.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Padang meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan longsor tanah dan kawasan rawan bencana banjir/genangan. Kawasan rawan bencana di Kota Padang dapat dikategorikan berdasarkan faktor penyebab kerawanannya. Pada dasarnya Kota Padang adalah kawasan rawan bencana terutama bencana gempa bumi. Namun demikian kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah kawasan yang diindikasikan memiliki kerawanan sangat tinggi dan kerawanan tinggi. Pada kawasanyang memiliki kerawanan sedang dilakukan pengembangan terbatas dengan melakukan rekayasa teknis sehingga dapat meminimalkan dampak yang merugikan akibat bencana.

2.1.3.1. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Tsunami

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797, tahun 1833 dan terakhir pada tahun 2010 yang melanda kabupaten Kepulauan Mentawai

Daerah dengan kemiringan lereng antara (0-2)% di wilayah Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Koto Tengah dan sebagian Kecamatan Kuranji merupakan daerah yang rawan tsunami.

Berdasarkan kajian bencana tsunami maka penetapan ruang/kawasan rawan bencana tsunami direncanakan sebagai berikut:

- 1) Kawasan Resiko Sangat Tinggi adalah kawasan yang diterjang gelombang tsunami dengan kedalaman air >3 m dan kecepatan aliran air >2 mt/dtk.
- 2) Kawasan Resiko Tinggi adalah kawasan yang diterjang gelombang tsunami dengan kedalaman air 1,5 - 3 m dan kecepatan aliran air 1,5 - 2 mt/dtk
- 3) Kawasan Resiko Cukup Tinggi adalah kawasan yang diterjang gelombang tsunami dengan kedalaman air 1 - 1,5 m dan kecepatan aliran air 1 – 1,5 mt/dtk.
- 4) Kawasan Resiko Sedang adalah kawasan yang diterjang gelombang tsunami dengan kedalaman air 0,75 - 1 m dan kecepatan aliran air 0,75 - 1 mt/dtk.
- 5) Kawasan Resiko Rendah adalah kawasan yang diterjang gelombang tsunami dengan kedalaman air <0,75 m dan kecepatan aliran air 0,78 mt/dtk.

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah:

1. Kecamatan Koto Tengah;
2. Kecamatan Nanggalo;
3. Kecamatan Padang Utara;
4. Kecamatan Padang Barat;
5. Kecamatan Padang Timur;
6. Kecamatan Padang Selatan; dan
7. Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Secara umum ruang/kawasan dengan resiko tinggi dan resiko sangat tinggi dan resiko cukup tinggi direkomendasikan untuk pengembangan kawasan lindung atau kawasan budidaya non permukiman (perkebunan, pertanian dsb).

Namun kondisi di Kota Padang kawasan tersebut pada umumnya merupakan kawasan budidaya, demikian pengaturannya direncanakan sebagai berikut :

1. Kawasan rawan tsunami yang terletak pada ruang dengan fungsi lindung (sempadan pantai) ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2. Pada kawasan rawan bencana tsunami tersebut yang belum terbangun dan terletak pada kawasan budidaya maka direncanakan untuk pengembangan kegiatan penggunaan non permukiman, pertanian, Ruang Terbuka Hijau, atau fungsi-fungsi lain yang bertujuan untuk meminimalkan dampak daripada bencana tsunami.
3. Pada kawasan rawan bencana tsunami yang sudah terbangun dan terletak pada kawasan budidaya maka direncanakan untuk membatasi pengembangan intensitas ruang, mengarahkan untuk pengembangan kegiatan yang tidak berlangsung 24 jam (non perumahan) dan tidak menimbulkan konsentrasi massa yang terpusat.

4. Pada kawasan rawan bencana tsunami yang sudah terbangun dan terletak pada kawasan dengan fungsi lindung maka ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Langkah-langkah mitigasi bencana yang harus dilakukan selanjutnya adalah:

- a. Melakukan penghijauan pada kawasan rawan tsunami resiko sangat tinggi dengan tanaman yang dapat berfungsi sebagai barier apabila terjadi gelombang pasang dan tsunami.
- b. mengidentifikasi daerah bahaya berdasarkan kemungkinan tingkat kerusakan yang akan terjadi,
- c. mengidentifikasi bangunan umum terdekat yang dapat dijadikan sebagai bangunan perlindungan (*escape building*), dan
- d. mengidentifikasi jalur-jalur jalan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan diri (*escape road*) menuju bangunan perlindungan (*escape building*).

2.1.3.2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Bahaya banjir di Kota Padang dapat dibedakan menjadi bahaya banjir tinggi, sedang dan ringan. Kota Padang mempunyai potensi banjir tinggi dan sedang bahkan terdapat potensi banjir bandang. Bahaya banjir sedang jarang terjadi dan kalau terjadi hanya dalam jangka waktu relatif panjang, sedangkan yang sering terjadi banjir ringan dalam bentuk genangan sementara pada musim hujan.

Banjir sedang terjadi pada wilayah perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan *aluvial* bagian Tengah, dan bentuk lahan miring bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik. Daerah ini merupakan lahan *aluvial* dan miring yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Oleh karena

Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata curah hujan 348 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang.

Kota Padang merupakan perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian tengah dan lahan marin bagian Barat karena Padang memiliki beberapa sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Hal ini didukung lagi bahwa Kota Padang merupakan daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 384,88 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 15-17 hari per bulan. Apalagi luapan sungai tersebut bersamaan dengan terjadinya pasang laut. Tingkat bahaya banjir Kota Padang dibedakan berdasarkan tingkat bahaya tinggi dan tingkat bahaya sedang. Tingkat bahaya banjir tinggi umumnya tersebar pada daerah dataran yang memiliki satuan bentuk lahan dataran banjir, dataran aluvial, rawa belakang dan depresi antar gisik. Tingkat bahaya banjir terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tengah dengan luas daerah 700 Ha. Tingkat bahaya banjir sedang terdapat pada Kecamatan Kuranji dengan luas daerah 802 Ha. Tingkat tinggi bahaya banjir biasanya disebabkan oleh curah hujan tinggi dan terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut di Kota Padang memiliki tipe pasang surut ganda campuran, artinya dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dan tidak membahayakan Kota Padang. Beberapa wilayah yang diidentifikasi rawan bencana banjir di wilayah Kota Padang menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang antara lain adalah Lubuk Minturun, Simpang Kalumpang, Padang Sarai, Dadok Rawan Panjang sekitarnya, Ikur Koto, Anak Air, Padang Sarai semuanya berada di Kecamatan Koto Tengah. Kemudian, Lapai, Siteba, Maransi, Gunung Pangilun di wilayah Kecamatan Nanggalo, serta Ampang, Gunung Sarik, Andalas di wilayah Kecamatan Kuranji. Daerah Simpang Haru yang termasuk wilayah Kecamatan Padang Timur juga merupakan wilayah

rawan banjir, serta dua daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Begalung yaitu Parak Laweh dan Arai Pinang. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan melalui pembuatan pintu-pintu air yang dilengkapi dengan pompa air. Untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan banjir di lokasi tersebut perlu lakukan upaya lebih jauh, berupa pembuatan danau buatan (*folder*) sebagai penampung banjir. Pembuatan *folder* ini diintegrasikan dengan upaya pengembangan pariwisata dan rekreasi. Secara khusus pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pencegahan terjadinya banjir melalui pengembangan *folder* pengendalian banjir yang terpadu dengan pengembangan pintu air dan pompa air pada titik-titik tertentu di sepanjang 5 sungai besar;
2. Pada kawasan banjir yang sudah terbangun perlu dilakukan kajian untuk merelokasi penduduk yang bermukim di kawasan tersebut;
3. Pada lahan yang belum terbangun dilakukan dengan melarang atau memberlakukan disinsentif pengembangan ruang pada kawasan rawan banjir

2.1.3.3. Kawasan Rawan Bencana Geologi

Berdasarkan kajian bencana geologi di Kota Padang terdapat kerawanan bencana geologi, antara lain gempa, liquifaksi, gerakan tanah, dan longsor. Dari kajian kebencanaan tersebut Kota Padang berdasarkan tingkat kerawanannya terhadap bencana dapat dikategorikan sebagai berikut ;

1. Kawasan Stabil

Terdapat pada daerah dataran yang tersusun oleh Endapan aluvial, rawa, Kipas aluvial, pematang pantai dan dataran pantai, berupa lempung – pasir, kerikil – kerakal, lepas – agak padat, sudut lereng 0 – 5 % berupa dataran dengan elevasi 0 – 5 m (dml), tipe erosi limpasan – alur, serta runtuh tebing sungai sebagai akibat

limpasan aktifitas aliran air sungai. Kawasan Stabil meliputi sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota Padang.

2. Kawasan Tidak Stabil Tingkat Rendah – Sedang

Terdapat pada daerah barat laut hingga ke arah selatan, yang tersusun oleh Endapan Dataran Aluvial berupa endapan vulkanik (dominan) berupa lahar, tuf dan koluvium, sifat endapan padat–sangat padat, sudut lereng 5–30% berupa dataran bergelombang dengan elevasi 5–10 m (dml), tipe erosi alur-lembah (runtuhan tebing sungai) akibat aktifitas aliran air permukaan dan sungai. Kawasan Tidak Stabil Tingkat Rendah – Sedang meliputi bagian timurlaut–tenggara, sedikit berada pada bagian barat Kota Padang.

3. Kawasan Tidak Stabil Tingkat Sedang – Tinggi

Terdapat pada daerah dataran – perbukitan yang tersusun oleh batuan tua yang terdiri dari malihan/metamorf, sifat endapan sangat padat, mudah tererosi oleh aliran air permukaan dan terdapat dinding dengan >30% hingga tegak lurus, dapat runtuh. Tipe erosi limpasan-galur-jurang. Adanya guncangan gempa bumi dapat menimbulkan rekahan-rekahan ke arah lembah yang dapat menyebabkan terjadinya longsoran ke arah hulu. Kawasan Tidak Stabil Tingkat Sedang–Tinggi meliputi bagian timurlaut hingga tenggara, dan Selatan Kota Padang

Kawasan rawan bencana geologi meliputi:

- a. ruang yang diindikasikan berada pada jalur patahan;
- b. kawasan rawan longsor dan gerakan tanah; dan
- c. kawasan rawan likuifaksi.

Kawasan rawan bencana likuifaksi meliputi:

- a. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan tinggi terletak di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat;

- b. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan sedang terletak di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Padang Timur; dan
- c. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan rendah terletak di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung.

Secara umum Kota Padang memiliki kerawanan terhadap bahaya gempa dan liquifaksi, sehingga pengaturan ruangnya direncanakan sebagai berikut :

1. Pada kawasan yang rawan terhadap gempa bumi yang sudah terbangun (kawasan budidaya) maka direncanakan untuk mengembangkan kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang kota (perumahan maupun non perumahan) dengan pengaturan pengembangan bangunan yang tahan gempa, merencanakan komposisi massa bangunan yang memudahkan untuk evakuasi apabila terjadi gempa, menyiapkan ruang terbuka atau Ruang Terbuka Hijau di sekitar bangunan yang aman terhadap keruntuhan bangunan sebagai ruang evakuasi apabila terjadi bencana yang (diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi).
2. Pada kawasan yang rawan terhadap liquifaksi pengembangan bangunan direncanakan untuk pengembangan intensitas rendah. Namun demikian maka pengembangan bangunan harus mempertimbangkan kekuatan struktur pondasi yang akan menopang bangunan dengan memperhatikan kerawanan terhadap liquifaksi.
3. Pada kawasan yang diindikasikan terdapat sesar direncanakan sebagai kawasan tidak terbangun. Pengembangannya diarahkan untuk Ruang Terbuka Hijau Pertanian Perkotaan.

2.1.3.4. Longsoran Lahan

Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan menunjukkan sebagian besar daerah berada pada daerah yang memiliki tingkat bahaya

longsoran lahan yang tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 0-8%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng kaki pegunungan dan kompleks perbukitan vulkanik.

Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng berkisar 23 - 99%. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan (*irreguler*), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 - 1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan daerah tersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan berkisar 0 - 8%. Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnya terkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada setiap kecamatan.

2.1.3.5. Erosi Pantai

Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang, arus laut dan *longshore current* atau arus sejajar pantai.

Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai

Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah.

Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun (*creep*) kurang memadai sebagai pemecah gelombang. Oleh karena konstruksi ini berfungsi menghadang aliran litoral (*litoral drift*). Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Umumnya pantai Padang kebanyakan pantai pasir yang terdiri dari *kuarsa* dan *feldspar*, bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (*upland*). Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, merupakan sisa-sisa terumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan.

2.1.3.6. Kebakaran

Bahaya kebakaran untuk Kota Padang digolongkan menjadi 3 wilayah yaitu:

1. Tingkat Resiko Kebakaran-1
Resiko terbesar terdapat di Kecamatan Padang Utara, Padang Timur, dan Padang Barat yang merupakan area pusat perdagangan kepadatan tertinggi.
2. Tingkat Resiko Kebakaran-2
Kecamatan Kuranji, Nanggalo, Padang Selatan, dan Lubuk Begalung sebagai kecamatan tumbuh cepat.
3. Tingkat Resiko Kebakaran-3
Kecamatan dengan bahaya kecil akan kebakaran terdapat di kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tangah karena dekat dengan hutan.

2.1.4 Demografi

2.1.4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Padang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,57 persen (SP 2010). Pada tahun 2010 Jumlah Penduduk Kota Padang berjumlah 833.562 orang dan meningkat menjadi 889.646 orang pada tahun 2014. Jika dilihat dari persebaran penduduk menurut kecamatan, maka jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Koto Tengah sedangkan Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki jumlah penduduk paling sedikit.

Tabel 2. 9
Jumlah Penduduk Menurut Kec. di Kota Padang (orang)

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kepadatan pddk Tahun 2015
1	Bungus Teluk Kabung	22.896	23.142	23.360	23.858	24.137	24.408	242
2	Lubuk Kilangan	48.850	49.751	50.249	51.847	52.757	53.651	624
3	Lubuk Begalung	106.432	108.018	109.584	113.217	115.286	117..321	3.796
4	Padang Selatan	57.718	57.386	58.320	58.780	59.038	59.287	5.911
5	Padang Timur	77.868	77.932	77.989	78.789	78.975	79.151	9.712
6	Padang Barat	45.380	46.060	46.411	45.781	45.846	45.907	6.558
7	Padang Utara	69.119	69.275	69.729	70.051	70.252	70.444	8.718
8	Nanggalo	57.275	57.731	58.232	59.137	59.654	60.157	7.454
9	Kuranji	126.729	128.835	130.916	135.787	138.584	141.343	2.462
10	P a u h	59.216	60.553	61.755	84.864	66.661	68.448	468
11	Koto Tengah	162.079	165.633	167.791	174.567	178.456	182.296	785
	J u m l a h	833.562	844.316	854.336	896.678	889.646	902.413	1.299

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kota Padang masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Kecamatan Padang Timur yang berada di pusat kota memiliki tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 9.712 jiwa/Km², yang diikuti oleh kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 8.718

jiwa/Km² dan 7.454 jiwa/Km². Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berada jauh dari pusat kota memiliki tingkat kepadatan yang paling rendah yakni 242 jiwa/Km².

2.1.4.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur

Komposisi penduduk Kota Padang menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan relatif lebih sedikit dari laki-laki dengan *sex ratio* 99,72 %. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 50,17 % dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun.

Tabel 2. 10
Komposisi Penduduk Kota Padang
Menurut Kelompok Umur Tahun 2015

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah	
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	%	Ratio
0 – 4	40.453	41.759	82.212	9,11	103
5 – 9	38.223	40.006	78.229	8,66	105
10 – 14	36.844	38.197	75.041	8,31	104
15 – 19	48.668	47.310	95.978	10,63	97
20 – 24	57.921	58.430	116.351	12,89	101
25 – 29	37.330	40.145	77.475	8,58	108
30 – 34	32.663	32.369	65.032	7,20	99
35 – 39	31.833	30.578	62.411	6,91	96
40 – 44	30.257	29.359	59.616	6,60	97
45 – 49	25.890	25.430	51.320	5,68	98
50 – 54	22.267	22.098	44.365	4,91	99
55 – 59	18.591	18.386	36.977	4,09	99
60 – 64	11.922	11.677	23.599	2,61	98
65 +	18.975	14.832	33.807	3,74	78
JUMLAH	451.837	450.576	902.413	100	99,72

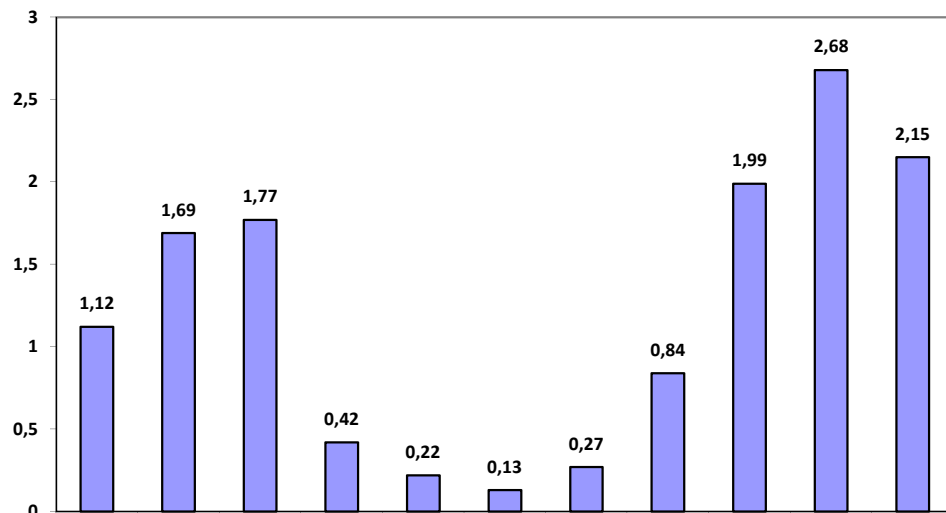
Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

Struktur umur penduduk Kota Padang berbentuk piramida dengan proporsi penduduk semakin tua semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan penduduk usia 0-14 tahun sebesar 235.482 jiwa (26,08%), penduduk 15-64 tahun

sebesar 633.124 jiwa (70,18%) dan penduduk usia 65 tahun keatas berjumlah 33.807 (3.74%).

Sebagian besar komposisi penduduk produktif tahun 2015 tersebar pada kelompok umur usia muda 15-34 tahun. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya berada pada kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun, sedangkan titik *threshold* terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian secara perlahan mulai turun pada usia kerja usia 30 sampai 75 tahun keatas.

Gambar 2. 5.1
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang
Menurut Kecamatan Tahun 2015



Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2016

2.1.4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan data terakhir tahun 2015 Angka IPM Kota Padang mencapai 80,36. Perkembangan IPM dari 6 tahun terakhir sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2. 11
IPM Kota Padang menurut Komponen 2010-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran riil per kapita (ribu rupiah)	IPM
2010	73,17	14,62	10,34	13.196,90	78,44
2011	73,17	14,62	10,52	13.236,52	78,68
2012	73,18	14,62	10,75	13.280,39	79,00
2013	73,18	14,65	10,89	13.339,31	79,23
2014	73,18	15,20	10,93	13.387,11	79,83
2015	73,19	15,60	10,97	13.521,96	80,36

Sumber: BPS Kota Padang, 2016

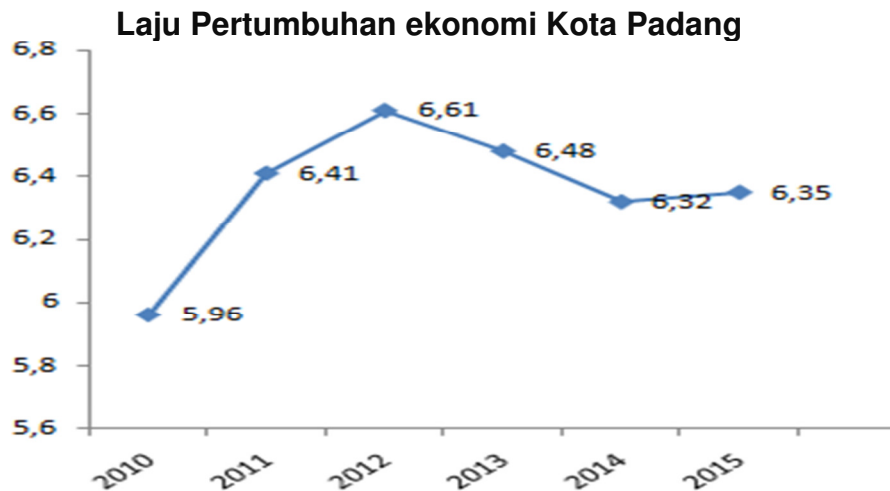
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan kota. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB Kota Padang mencapai sekitar 6,35 %, angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 (6,32%) dan 2013 (6,48%). Sedangkan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,61 % dan tahun 2011 (6,41%) Kenaikan pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir setelah terjadinya gempa pada tahun 2009 mengalami penurunan drastis, yaitu sekitar 5,08 %.

Gambar 2. 6



Sumber: PDA 2016, BPS Kota Padang

Selama kurun waktu 2012-2013, nilai PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 32,78 trilyun Rupiah meningkat pada tahun 2015 menjadi 44,69 Trilyun rupiah yang berarti PDRB Kota Padang secara nominal mengalami kenaikan sebesar 11,91 Trilyun Rupiah.

Tabel 2. 12

Perkembangan Nilai PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2011-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian peternakan kehutanan Perikanan	1.501.869	1.635.725	1.820.535	2.073.248	2.290.028
2	Pertambangan dan penggalian	873.989	975.681	1.154.953	1.378.248	1.554.415
3	Industri pengolahan	5.118.520	5.548.841	5.972.955	6.564.127	6.924.703
4	Pengadaan Listrik, gas, air bersih	27.452	25.418	24.152	29.926	39.377
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.212	51.011	51.662	56.483	65.138
6	Konstruksi	2.478.911	2.869.855	3.367.206	3.985.248	4,547.797
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.179.164	5.781.003	6.318.894	6.869.650	7.537.071

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
8	Transportasi dan Pergudangan	4.391.249	4.828.562	5.641.558	6.623.148	7.196.332
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314.257	346.942	409.409	484.146	568.213
10	Informasi dan Komunikasi	2.147.480	2.523.075	2.610.650	2.860.585	2.853.433
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.481.569	1.809.581	1.985.559	2.315.078	2.495.446
12	Jasa Perusahaan	423.587	477.749	543.173	597.983	669.368
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	2.080.312	2.327.620	2.570.975	2.734.468	2.706.379
14	Jasa Pendidikan	1.224.273	1.412.909	1.676.466	1.912.471	2.126.788
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415.506	490.797	559.659	618.434	667.175
16	Jasa Lainnya	594.009	672.464	788.253	891.386	990.935
PDRB Kota Padang		29.218.101,65	32.781.065	36.629.159	41.295.599	44.696.341

Sumber: PDA 2016, BPS Kota Padang

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2011 selama kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan, data terakhir menunjukkan pada tahun 2015 sebesar 35,19 trilyun rupiah. Dapat lengkap diperlihatkan dalam tabel 2.13 berikut:

Tabel 2. 13
Perkembangan Nilai PDRB Kota Padang Atas Harga Konstan (ADHK)menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2011-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013*	2014**	2015
1	Pertanian peternakan kehutanan Perikanan	1 382 382,73	1.430.811,90	1.487.352,30	1.583.987,40	1.693.216,39
2	Pertambangan dan penggalian	816 532,30	853.173,31	926.568,20	982.80,30	1.039.292,46
3	Industri pengolahan	4 688 263,89	.882.661,81	5.137.989,20	5.407.104,00	5.630.994,35
4	Pengadaan Listrik, gas, air bersih	29 761,77	31.541,19	32.228,60	34.868,60	35.312,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46 271,16	48.037,41	51.729,60	54.701,60	57.944,10

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013*	2014**	2015
6	Konstruksi	2 354 779,73	586.975,00	2.813.011,00	3.075.643,30	3.376.182,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 863 394,85	.140.752,66	5.446.981,90	5.754.235,20	6.053.051,92
8	Transportasi dan Pergudangan	4 203 338,54	4.479.046,64	4.905.120,40	5.327.883,50	5.734.205,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288 142,25	299.220,34	319.139,00	344.491,60	366.495,29
10	Informasi dan Komunikasi	2 072 885,49	2.294.180,27	2.483.038,10	2.666.740,40	2.904.687,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 363 068,8	1.512.798,72	1.603.149,00	1.735.390,50	1.802.305,45
12	Real Estat	875 392,68	923.397,29	979.036,30	1.038.888,00	1.106.680,89
13	Jasa Perusahaan	406 148,97	440.955,95	463.349,10	490.930,00	520.886,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	1 962 144,49	1.966.929,95	1.996.215,00	2.026.367,40	2.100.344,27
15	Jasa Pendidikan	1 131 861,35	1.229.090,51	1.338.636,80	1.428.340,10	1.547.775,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	382 209,44	420.479,04	450.558,40	486.285,20	527.988,09
17	Jasa Lainnya	560 804,77	578.362,69	620.364,30	656.119,40	699.487,34
PDRB Kota Padang		27.427.383,22	29.118.414,68	31.054.497,20	33.094.946,00	35.197.850,27

Sumber: PDA 2016, BPS Kota Padang

Tabel 2.14 menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB yang dapat menggambarkan seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian. Selama tahun 2012-2015 struktur perekonomian kota Padang didominasi oleh 3 (tiga) sektor, yaitu: industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan.

Tabel 2. 14
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian peternakan kehutanan Perikanan	5,10	5,04	4,99	4,97	5,02	5,12
2	Pertambangan dan penggalian	3,03	2,98	2,98	3,15	3,34	3,48
3	Industri pengolahan	17,52	17,09	16,93	16,31	15,90	15,49
4	Pengadaan Listrik,gas,air bersih	0,11	0,11	0,08	0,07	0,07	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,16	0,14	0,14	0,15
6	Konstruksi	8,35	8,59	8,76	9,19	9,65	10,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,89	17,73	17,64	17,25	16,64	16,86
8	Transportasi dan Pergudangan	15,13	15,33	14,73	15,40	16,04	16,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,07	1,05	1,06	1,12	1,17	1,27
10	Informasi dan Komunikasi	7,62	7,56	7,70	7,13	6,93	6,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,82	4,97	5,52	5,42	5,61	5,58
12	Real Estat	3,23	3,19	3,06	3,09	3,15	3,27
13	Jasa Perusahaan	1,50	1,48	1,46	1,48	1,45	1,50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	6,98	7,15	7,10	7,02	6,62	6,06
15	Jasa Pendidikan	4,03	4,13	4,31	4,58	4,63	4,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,39	1,50	1,53	1,50	1,49
17	Jasa Lainnya	2,07	2,04	2,05	2,15	2,16	2,22
PDRB Kota Padang		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: PDA 2016, BPS Kota Padang

2.2.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi di Kota Padang dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa kota besar

lainnya di Indonesia, bahkan berada diatas laju inflasi nasional. Tingginya tingkat inflasi di Kota Padang terjadi akibat dorongan kenaikan harga dari 300 komoditas yang diperdagangkan di pasar, terutama kenaikan harga barang- barang kebutuhan pokok dan biaya transportasi yang merupakan reaksi pasar terhadap kenaikan Harga BBM.

Gambar 2. 7
Perkembangan Laju Inflasi Kota Padang 2010-2015



Sumber: BPS Kota Padang, 2016

Perkembangan inflasi Kota Padang menurut kelompok barang tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2. 15
Perkembangan Inflasi Kota Padang Menurut Kelompok Barang

Kelompok Barang	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bahan Makanan	5,85	0,94	2,33	1,01	1,70	5,20
Makanan jadi, minuman & rokok	0,60	0,18	0,80	1,01	0,30	5,49
Perumahan	0,49	0,01	0,02	1,00	0,88	3,96
Sandang	0,74	2,51	0,41	1,00	-0,04	2,75
Kesehatan	0,03	0,00	0,08	1,00	0,72	7,7
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,00	0,02	0,21	1,00	0,61	9,35

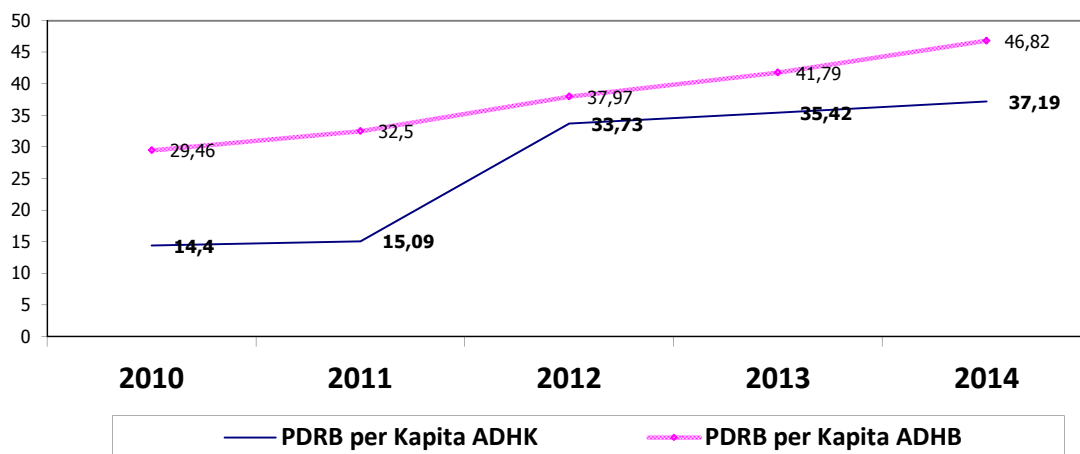
Transportasi & Komunikasi	0,13	0,00	0,33	1,02	1,12	-2,40
Umum	2,00	0,48	0,94	1,01	0,95	0,85
Kota Padang	7,84	5,37	4,16	10,87	11,90	1,08
Nasional	6,96	3,79	4,3	8,38	8,36	3,35

Sumber: BPS Kota Padang, 2016

2.2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB perkapita menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi di suatu daerah. PDRB perkapita dapat dilihat dari dua konsep yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Gambar 2.6 menunjukkan perkembangan nilai PDRB perkapita penduduk Kota Padang.

Gambar 2. 8PDRB Perkapita Penduduk Kota Padang Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)



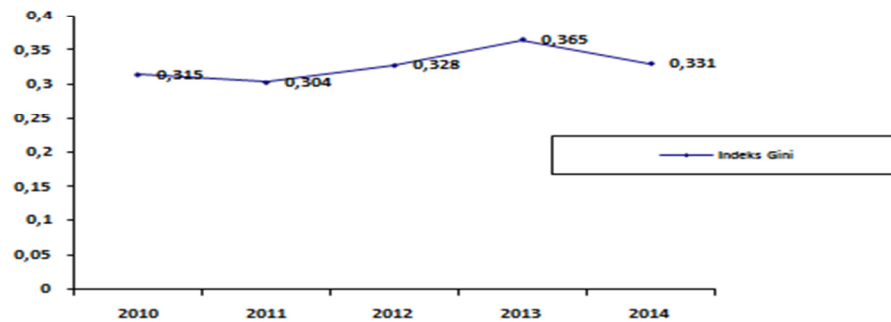
Sumber : PDA 2015, BPS Kota Padang

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk. Selama kurun waktu 2010-2013 rasio indeks gini di Kota

Padang cenderung meningkat, pada tahun. 2014 berhasil mencapai penurunan dengan nilai 3.31.

Gambar 2. 9
Indeks Gini Kota Padang Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kota Padang 2015

2.2.1.5 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Penurunan kemiskinan merupakan bukti keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang didorong oleh peningkatan partisipasi penduduk dalam lapangan usaha. Selama periode 2010-2015, kota Padang telah berhasil menurunkan jumlah dan presentase penduduk miskin kota, seperti terlihat pada data dalam tabel 2.16.

Tabel 2. 16
Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Padang
Tahun 2010-2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu orang)	Persentase
2010	306.108	52,80	6,31
2011	326.705	50,90	6,31
2012	350.088	45,90	5,30
2013	377.943	44,20	5,02
2014	395.785	40,70	4,56
2015	414.612	44.43	4.93

Sumber: PDA 2016, BPS Kota Padang

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 fokus kesejahteraan sosial diukur melalui beberapa aspek, antara lain : Pendidikan, Kesehatan dan ketenagakerjaan serta budaya dan olahraga. Kondisi kesejahteraan sosial kota Padang selengkapnya disajikan dalam uraian berikut.

2.2.2.1 Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja fokus kesejahteraan sosial bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu Angka harapan lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Perkembangan indikator kinerja fokus kesejahteraan bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.17.

Angka harapan lama sekolah dari tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan meskipun cukup lambat namun pada tahun 2014 justru mengalami penurunan. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan tren penurunan meskipun sempat naik pada tahun 2013 (108,31) namun pada tahun 2014 menurun kembali menjadi 106,12. Perkembangan yang hampir sama juga terjadi pada APK SMP meskipun sempat naik pada tahun 2011 (96,22) kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut yaitu 94,32 pada tahun 2012 dan 90,87 pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 98,35. Sebaliknya APK SMA menunjukkan peningkatan selama 4 (empat) tahun terakhir. secara umum APM pada tahun 2014 mengalami peningkatan untuk seluruh jenjang pendidikan jika dibandingkan dengan tahun 2013.

Tabel 2. 17
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Bidang Pendidikan Kota Padang Tahun 2010 s.d 2015

NO	URAIAN	SATUAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	10,91	10,92	10,94	10,94	10,89	
2	Angka Partisipasi Kasar							
	SD (7-12)	%	109,2	98,91	98,94	108,31	106,12	99,44
	SMP (13-15)	%	84,53	96,22	94,32	90,87	98,35	95,98
	SMA(16-18)	%	88,52	74,85	74,62	68,22	80,49	82,53
3	Angka Partisipasi Murni							
	SD (7-12)	%	95,68	90,54	90,71	95,50	96,17	98,12
	SMP (13-15)	%	73,28	72,20	71,94	83,73	85,17	75,99
	SMA(16-18)	%	64,70	60,27	60,21	60,17	65,85	66,90

Sumber: BPS kota Padang 2016

2.2.2.2 Kesehatan

Tiga komponen utama sebagai indikator kesehatan adalah: (1) Angka Harapan Hidup (*expectation of life*), (2) angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran. Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan (*infant mortality rate*), dan (3) Balita Gizi Buruk.. Perkembangan indikator kesehatan di Kota Padang tahun 2010-2014 dapat dilihat Tabel 2.18

Tabel 2. 18
Perkembangan Indikator Kesejahteraan Sosial
Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Usia Harapan Hidup	70,89	71,14	71,39	71,44	73,18	*)
2.	Kematian Bayi (per 1.000)	3,64	2,83	2,32	1,37	2,93	3,51
3.	Balita Gizi Buruk (%)	0,130	0,08	0,07	0,131	0,134	0,608

Sumber: PDA, BPS Tahun 2016 dan DKK Kota Padang, 2016

Angka Harapan Hidup (*Expectation of Life*) yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidup memberikan gambaran membaiknya derajat kesehatan penduduk Kota Padang pada periode tersebut. Angka Harapan Hidup warga Kota Padang sudah mencapai 72 tahun. Angka ini

sudah berada diatas rata-rata Negara Sedang Berkembang (NSB), yaitu 55 s/d 60 tahun.

Dilihat Kelangsungan Hidup Bayi pada tahun 2010-2012 kelangsungan hidup bayi berada pada angka yang konstan yaitu 77 persen kemudian pada tahun 2013 angka kelangsunga hidup bayi mengalami peningkatan menjadi 71,9 persen. Kondisi ini sebanding dengan menurunnya jumlah balita gizi buruk yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan bayi. Tetapi pada tahun 2014, kedua indikator ini kembali mengalami peningkatan.

2.2.2.3 Ketenagakerjaan

Pada aspek ketenagakerjaan, rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi selama periode 2010-2015, namun secara rata-rata nilai berada pada 0,84. Nilai ini memperlihatkan perlunya upaya untuk terus mendorong peningkatan penciptaan lapangan kerja agar dapat meningkatkan rasio penduduk bekerja.

Tabel 2. 19
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Padang
Tahun 2010 s.d 2015

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angkatan Kerja (orang)	357.206	400.920	334.691	369.640	389.991	402.140
2.	Penduduk yang Bekerja (orang)	304.790	363.659	296.263	315.530	342.119	336.755
3.	Rasio Penduduk yang bekerja	0,85	0,91	0,89	0,86	0,88	0,84

Sumber: BPS Kota Padang, 2016

2.2.2.4 Fokus Budaya dan Olah Raga

Indikator budaya dan olah raga yang digambarkan dengan jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olah raga dan

jumlah gedung olah raga. Perkembangan indikator ini dapat dilihat pada tabel 2.20, dimana dari tahun 2010-2014 tidak terjadi perubahan jumlah, grup kesenian berjumlah 91, gedung kesenian ada 4 unit, sedangkan jumlah klub olah raga ada 167, dan gedung olah raga berjumlah 16 unit. Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Padang berdasarkan status kepemilikan dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2. 20
Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Padang

No	Uraian	Pemerintah	Swasta	Masyarakat
1	Stadion	3	0	0
2	Gedung Olah Raga	9	2	2
3	Kolam Renang	3	1	1
4	Lapangan Tennis	10	0	12
5	Lapangan Voli	27	1	105
6	Lapangan Basket	18	0	16
7	Lapangan Takraw	10	0	35
8	Lapangan Bulu Tangkis	10	6	95
9	Lapangan Sepakbola	12	3	55
10	Lapangan Futsal	3	10	24
11	Tenis Meja	1	0	0
12	Lapangan Golf	2	0	0
13	Gelanggang Silat	0	0	1

Sumber: *Dispora Kota Padang, 2015*

Selain mengembangkan potensi seni budaya Minangkabau yang selaras dengan nilai-nilai Islami yang telah berkembang dalam masyarakat, di kota Padang juga berkembang seni budaya lain dalam masyarakat seperti Seni *Barongsai*, dan *Cap Go Meh* . Beberapa potensi seni dan budaya di kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2. 21
Potensi Seni Budaya Kota Padang

NO	URAIAN	Potensi
1.	Even seni budaya tahunan	Pekan budaya, Festival Siti Nurbaya, Festival Kuliner Rendang Padang, Pemilihan Uni dan Uda Padang

2.	Even Olah Raga	Dragon Boat, Porda, Tour de Singkarak
3.	Bangunan Bersejarah	Museum Adityawarman, Mesjid Raya Gantiang, kota Tua
4.	Even tradisi masyarakat	Balimau, Randai, Silek Pauah, musik dan tari tradisional lainnya , serta Barongsai dan Cak Go Meh

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran aspek pelayanan umum di Kota Padang dapat diuraikan atas focus pelayanan urusan wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Adapun perkembangan indikator focus layanan wajib pemerintah Kota Padang tahun 2010-2014, diuraikan di bawah ini.

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

Perkembangan indikator fokus layanan urusan pendidikan aspek pendidikan dasar dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah SD dan SMP, rasio guru terhadap murid tingkat SD dan SMP, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah tingkat SD dan SMP, rasio guru terhadap murid rata-rata perkelas sebagaimana dapat dilihat pada table 2.22.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar anak usia pendidikan tertentu berada dalam lingkup

pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh jumlah murid usia sekolah. Berdasarkan tabel 2.23, APS tingkat pendidikan dasar di Kota Padang sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya APS pendidikan dasar pada tahun 2014.

Tabel 2. 22
Perkembangan Indikator Fokus Layananan Urusan Pendidikan
Aspek Pendidikan Dasar Tahun 2010 s.d 2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah							
	SD	%	98,88	99,15	98,94	98,76	99,43	
	SMP	%	94,20	93,48	94,32	92,79	98,38	
2	Rasio guru/murid							
	SD	Per siswa 1000	1:13	1:15	1:16	1:17	1:18	1 : 19
	SMP	Per siswa 1000	1:15	1:12	1:11	1:11	1:11	1 : 14
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
	SD	Per siswa 1000	1:223	1:230	1:231	1:211	1:213	
	SMP	Per siswa 1000	1:473	1:466	1:477	1:457	1:446	
4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata							
	SD	Per siswa 1000	1:2:29	1:2:35	1:2:27	1:2:28	1:2:31	
	SMP	Per siswa 1000	1:15:43	1:3:36	1:3:30	1:3:30	1:3:32	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padang, 2015

b. Rasio Guru Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru menurut tingkat pendidikan per 1000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama tahun 2010 rasio guru terhadap murid pada tingkat SD/MI mengalami peningkatan sebaliknya rasio guru terhadap SMP/MTs mengalami penurunan. Sementara itu

rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada pendidikan dasar mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, perbandingan guru terhadap murid SD/MI adalah 1:18 artinya 1 guru mengajar 18 murid.

c. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Selama tahun 2010 - 2014, rasio ketersediaan sekolah semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk usia sekolah belum dapat diimbangi dengan penambahan gedung sekolah SD dan SMP.

d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

Pada tahun 2014, rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata pada tingkat SD adalah sebesar 1:2:31 artinya adalah bahwa 1 kelas SD diajar oleh 2 (dua) orang guru dimana kelas tersebut terdiri atas 31 orang siswa.

2. Pendidikan Menengah

Tabel 2.23. memperlihatkan perkembangan indikator pendidikan untuk tingkat SLTA di kota Padang tahun 2010-2014. Tampak bahwa rasio ketersediaan sekolah mengalami peningkatan karena pertumbuhan penduduk usia sekolah lebih besar dibandingkan sarana prasarannya. Hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk daerah lain yang bersekolah di kota Padang.

Tabel 2. 23

**Perkembangan Indikator Fokus Layananan Urusan Pendidikan
Aspek Pendidikan Menengah Atas Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Partisipasi Sekolah						
	SMA	%	76,70	77,40	74,62	74,98	83,34

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
2	Rasio guru/murid						
	SMA	Per 1000 siswa	1:11	1:10	1:10	1:10	1:10
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah						
	SMA	Per 1000 siswa	1:511	1:458	1:531	1:571	1:586
4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata						
	SMA	Per 1000 siswa	1:3:37	1:3:28	1:4:41	1:4:41	1:3:29

Sumber: BPS Kota Padang, 2015. Data Diolah

3. Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan

Angka Putus Sekolah (APS) mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan satu jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2014, APS untuk semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA menunjukkan tren peningkatan.

Tabel 2. 24
Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan di Kota Padang
Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Putus Sekolah						
	SD	%	0,06	0,05	0,05	0,01	0,07
	SMP	%	0,06	0,17	0,19	0,01	0,27
	SMA	%	0,68	1,16	0,01	0,01	0,39
2	Angka Kelulusan						
	SD	%	97,00	100	97,70	96,00	71,04
	SMP	%	94,25	99	81,73	95,00	88,38
	SMA	%	84,80	99,48	84,73	99,00	84,33
3	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	163,00	74,42	108,97	97,00	104,52
4	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	35,72	82,00	74,97	93,00	100,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padang, 2015

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk serta bersama masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio posyandu terhadap balita pada tahun 2014 di Kota Padang sebesar 1: 95, artinya satu posyandu melayani 95 orang balita.

2) Rasio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk

Rasio puskesmas dan pustu persatuan penduduk di Kota Padang selama kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2010, 1 (satu) puskesmas/pustu melayani 10.165 orang kemudian pada tahun 2014 jumlah penduduk yang dilayani oleh 1 (satu) puskesmas meningkat menjadi 10.591 orang. Hal tersebut mengindikasikan laju pertumbuhan penduduk belum diikuti dengan ketersediaan puskesmas/pustu.

Tabel 2. 25
Perkembangan Indikator Fokus Layanan Urusan Kesehatan
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio posyandu per balita	1:88	1:96	1:86	1:94	1:95
2	Rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk	1:10165	1:10296	1:10171	1:10437	1:10591
3	Rasio rumah sakit 'persatuan penduduk	1:30873	1:31271	1:31642	1:31310	1:31773
5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	1:1470	1:1357	1:1277	1:878	1:1342
6	Rasio puskesmas per kecamatan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Sumber: PDA 2015, BPS Kota Padang

3) *Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk*

Rasio ketersediaan rumah sakit menunjukkan jumlah rumah sakit yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah rumah sakit di Kota Padang pada tahun 2014 berjumlah 27 buah terdiri dari rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Selama kurun waktu 2010-2014 rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan. Rasio rumah sakit per penduduk pada tahun 2014 adalah 1:31.773. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kota Padang melayani 31.773 penduduk.

4) *Pola penyakit*

Pengendalian penyebaran penyakit, terutama penyakit menular menjadi salah satu indikator keberhasilan urusan kesehatan. Tabel 2.26 memperlihatkan pengendalian penyakit menular di kota Padang. Dimana perkembangan penyakit HIV/AIDS harus menjadi focus perhatian.

Tabel 2. 26
Perkembangan Indikator Fokus Layanan
Urusan Kesehatan Tahun 2010-2014

No	Jenis Penyakit	2011	2012	2013	2014
1	Acut Flaccid Paralysis	11	6	7	6
2	Prevalensi Tuberkulosis	2.561,6	1.349	1.288	1.928
3	Pneumonia	9.151	8.671	8.971	8.983
4	HIV/AIDS	64	79	59	320
5	Diare	34.798	34.798	18.747	18.747

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2015

2.3.1.2 *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Salah satu indikator kinerja yang dapat dilihat untuk mengetahui perkembangan indikator Pekerjaan Umum di Kota Padang selama kurun waktu 2010-2014 adalah melalui proporsi jalan menurut kondisi. Rincian proporsi jalan menurut kondisi dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2. 27
Perkembangan Indikator Fokus Layanan
Urusan Pekerjaan Umum

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kondisi baik	Km	958,00	785,97	803,256	1.004,11	1032,11
2	Kondisi sedang	Km	559,83	1.049,23	1.035,40 0	974,36	992,36
3	Kondisi rusak sedang	Km	124,60	346,92	266,340	196,44	178,44
4	Kondisi rusak berat	Km		231,28	308,400	238,50	210,50
5	Jumlah Total	Km	1.642,43	2413,40	2.413,40	2413,40	2413,40
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,33	32,57	33,28	41,61	42,77
7	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang	%	34,08	43,47	42,90	40,37	41,12
8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak sedang	%	7,59	14,37	11,04	8,14	7,39
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat	%	0,00	9,58	12,78	9,88	8,72

Sumber: BPS Kota Padang, 2015 Data diolah

Indikator selanjutnya untuk urusan pekerjaan umum adalah jaringan irigasi, meskipun lapangan usaha pertanian bukanlah lapangan usaha utama di kota Padang, namun perbaikan kualitas irigasi menjadi hal penting untuk mendorong produktivitas lapangan usaha pertanian kota, khususnya produksi beras dalam rangka ketahanan pangan daerah.

Tabel 2. 28
Perkembangan Jaringan Irigasi Kota Padang Tahun 2010-2014

No	KlasifikasiP rasarana pengairan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Primer	Km	15.970	15.970	15.970	31.800	31.800
2	Sekunder	Km	159.730	159.730	159.730	122.154	122.154
3	Tersier	Km	163.322	163.322	163.322	163.322	163.322
Jumlah		Km	339.022	339.022	339.022	317.276	317.276

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, 2015

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, Pengendalian dan pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk BKPRD. Dari tabel 2.29 tampak bahwa terjadi peningkatan rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2013-2014 . hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Padang memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan dalam pengembangan kota.

Tabel 2. 29
Perkembangan Indikator Fokus Layanan Urusan Penataan Ruang

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah berHPL/HGB	%	36,98	36,98	36,98	43,77	44,89
2	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	50,79	51,12	51,12	52,19	52,64

Sumber: DTRTBP Kota Padang Tahun 2015

2.3.1.3 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan indikator perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat dari jumlah rumah tangga pengguna air bersih,

listrik dan rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh dan rumah layak huni.

Tabel 2. 30
Perkembangan Indikator Fokus Layanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	46,48	46,48	46,48	64	64
2	Rumah tangga bersanitasi	%	48,7	48,7	48,7	90	90
3	Lingkungan permukiman kumuh	%	0,15	0,15	0,15	2,2	2,2
4	Rumah Layak Huni	%	48,7	68,6	95,59	95,7	97,9

Sumber: DTRTB Kota Padang, 2015

Dari tabel 2.30 terlihat terjadi pelonjakan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam menata ruang dan lingkungan kota, dengan tetap memperhatikan dan mewaspadaai luas lingkungan permukiman kumuh.

2.3.1.4 Urusan Sosial

Berdasarkan data terlihat bahwa PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan setiap tahun mengalami peningkatan namun pada tahun 2014 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial menurun dari 590 orang pada tahun 2013 menjadi 414 orang pada tahun 2014. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2014 meningkat sangat signifikan menjadi 595 orang PMKS.

Tabel 2. 31
Perkembangan Indikator Fokus Layanan Urusan Sosial

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah	26	26	26	25	23
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	73	73	73	73	73
3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	92	92	31	31	31

Sumber: Disosnaker Kota Padang 2015

2.3.1.5 Urusan Tenaga Kerja

Dari perkembangan indikator ketenagakerjaan yang harus lebih diwaspadai adalah angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, dimana indikator ini mengalami peningkatan dari 36 kasus pada tahun 2010 menjadi 87 kasus pada tahun 2014.

Tabel 2. 32
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	48,58	47,31	55,69	57,81	59,29
2	Angka Sengketa Pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	36	46	46	69	87
2	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	59,51	66,86	55,69	49,07	52,01
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	1.083	323	399	199	452
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	14,67	9,29	11,48	16,02	7,27

Sumber: BPS Kota Padang, 2015

2.3.1.6 *Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*

Berdasarkan data terlihat bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan, di sisi rasio KDRT secara umum mengalami penurunan dari 35 kasus yang ditangani pada tahun 2010 menjadi 26 kasus pada tahun 2014. Namun terlihat peningkatan penyelesaian pengaduan perlindungan dan anak.

Tabel 2. 33
Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	65,7	66,25	67,74	68	68,76
2	Rasio KDRT	%	35	40	34	35	26
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan dan anak	Kasus	90	70	78	60	85

Sumber: BKD dan Dinsosnaker Kota Padang, 2015

2.3.1.7 *Urusan Ketahanan Pangan*

Ketahanan pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi Kota Padang. Jika dilihat dari ketersediaan pangan utama terlihat angka yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2010. Ketersediaan pangan utama sebesar 226 Kg/Kap/Thn kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan ketersediaan pangan utama menjadi 258 Kg/Kap.Thn. hal ini juga didukung oleh regulasi ketahanan pangan yang dikeluarkan sejak tahun 2011.

Tabel 2. 34
Perkembangan Indikator Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kap/Thn	226	264	238,14	217,15	258

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang, 2015

2.3.1.7 Urusan Lingkungan hidup

Penanganan sampah selama lima tahun terakhir cukup baik terlihat dengan tren yang meningkat terhadap sampah yang ditangani. Hal ini semakin didukung dengan adanya Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah. Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2. 35
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penanganan sampah pangan	%	56,38	56,38	61,4	62,73	63
2	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	m ³ /orang	1,08	0,73	2,45	9,92	1,02
3	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	33	100

Sumber: DKP dan Bapedalda Kota Padang Tahun 2015

2.3.1.8 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk merupakan komponen penting, penduduk adalah subjek dan juga objek dalam usaha pembangunan. Untuk itu pencatatan tentang berbagai aspek kependudukan menjadi hal penting yang harus diperhatikan karena pencatatan yang baik akan menjadi sumber data yang valid bagi perencanaan dan kebijakan pembangunan

Tabel 2. 36

Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kepemilikan KTP	%	27,7	74,47	98,8	98,8	81
2	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	%	35,1	47,95	105,5	105,5	160
3	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Tahun 2015

2.3.1.9 Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Indikator pemberdayaan masyarakat di kota Padang diantaranya diukur dari jumlah PKK dan Posyandu aktif, dimana selama periode 2010-2014 semua PKK dan Posyandu yang ada di kota Padang aktif dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat kota.

2.3.1.10 Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan yang berperan dalam menjaga pertumbuhan penduduk guna mendorong peningkatan manfaat pembangunan bagi penduduk dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan indikator urusan ini menunjukkan keberhasilan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2. 37
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	4,30	4,50	4,27	4,30	3,80
2	Rasio akseptor KB	%	72,92	69,23	72,64	73,13	71,66
3	Cakupan peserta KB aktif	%	93,95	93,76	91,66	89,51	95,13
4	Keluarga Pra sejahtera	KK	5265	4209	4523	3467	3131
5	Keluarga Sejahtera I	KK	36822	36249	36231	27089	27045

Sumber: BPMPKB Kota Padang, 2015

2.3.1.11 Urusan Perhubungan

Sebagai ibukota provinsi dan kota yang masih terus tumbuh dan berkembang, maka urusan perhubungan merupakan tugas layanan yang harus diperhatikan agar kota Padang menjadi kota yang aman dan tertib, serta lancar dalam bertransportas dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dan penduduk kota. Perkembangan indikator urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.38.

Tabel 2. 38
Perkembangan Indikator Perhubungan Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Angkutan Umum	unit	3.205	3.180	2.647	2.645	2.608
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	2	2	2	3	6
3	Jumlah uji KIR Angkutan Umum	unit	20.858	3.128	22.471	24.294	3.861

4	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	6.634	7.492	7.664	8.205	4.425
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan umum (KIR)	menit	25	25	25	25	11
6	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	33.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	Pemasangan rambu-rambu	unit	554.634	586.387	608.285	640.897	640.897

Sumber: Dishubkominfo Kota Padang, 2015

2.3.1.14 Urusan Komunikasi dan informatika

Komunikasi dan informasi adalah aspek yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat ditengah perkembangan teknologi dewas ini. Perkembangan urusan ini di kota Padang selama kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.39.

Tabel 2. 39

Perkembangan Indikator Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Aspek Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	jenis	13	13	14	15	48
2	Jumlah penyiaran radio/Tv local	unit	13	13	14	18	9
3	Website milikpemda	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber: Dishubkominfo Kota Padang, 2015

2.3.1.15 Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Mayoritas pelaku usaha di kota Padang khususnya dan Indonesia pada umumnya adalah berskala mikro, kecil dan menengah. Untuk itu perhatian terhadap pengembangan kelompok usaha ini berperan penting dalam menumbuh kembangkan perekonomian daerah dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Perkembangan indikator untuk urusan layanan ini tampak pada tabel 2.40.

Tabel 2. 40
Perkembangan Indikator Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Koperasi aktif	buah	416	500	545	570	602
2	Jumlah BPR/LKM	unit	10	10	10	10	10
3	Usaha Mikro Kecil	unit	11240	11357	11466	11578	11578

Sumber: Dinas koperasi dan UMKM Kota Padang, 2015

2.3.1.16 Urusan Penanaman Modal

Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan dalam mendorong peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan akan semakin besar dorongannya bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan penanaman modal di kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2. 41
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 s.d 2014 Kota Padang

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah investor	Nilai investasi (Juta Rupiah)	Jumlah investor	Nilai investasi (Ribuan Dollar)
2010	2	19.274,74	6	1.199,79
2011	1	4.443,52	4	5.628,58
2012	NA	NA	2	4.399,18
2013	13	132.386,90	33	35.216,50
2014	7	708.708,97	15	7.933,80

Sumber: BPMPTSP 2015

2.3.1.17 *Urusan Statistik*

Data dan informasi statistik sangat penting sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan. Ketersediaan data statistik di Kota Padang dapat dilihat dari ketersediaan Buku Padang dalam angka dan Buku PDRB Kota Padang yang setiap tahun dilaksanakan. Dokumen ini sangat penting untuk mengetahui gambaran kondisi daerah dan kinerja pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan, selama lima tahun terakhir Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan BPS Kota Padang menyusun Buku Padang Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Padang berdasarkan ADHB dan ADHK. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang disusun dan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.18 *Urusan Kebudayaan*

Kebudayaan merupakan manifestasi peradaban manusia, perkembangan indikator ini dalam urusan kebudayaan kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.42.

Tabel 2. 42

**Perkembangan Indikator Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar Aspek Kebudayaan Kota Padang Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	kali	2	6	3	6	2
2	Sarana penyelenggaraan seni	buah	2	2	2	2	3
3	Jumlah Benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	unit	34	34	34	62	62

4	Jumlah Benda/situs kawasan budaya daerah	Total dan cagar	Unit	73	73	73	73	73
5	Persentase benda/situs kawasan budaya dilestarikan	dan cagar yang	%	47	47	47	84,93	84,93

Sumber: Dibudpar Kota Padang, 2015

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan perikanan

Kota Padang merupakan kawasan yang memiliki kawasan laut dan pesisir, untuk itu urusan ini mempunyai peran penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi dan kualitas produknya. Perkembangan indikator urusan layanan ini dapat dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2. 43

Perkembangan Indikator Layanan Urusan Pilihan Aspek Kelautan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Produksi perikanan	Ton	18.098,1	18.647,5	18.585,6	20.068,1	20.772,8
2	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok Nelayan	140	156	173	193	84
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	14.608,42	15.828	15.248,27	15.725,21	14.540,96

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Tahun 2015

2.3.2.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan sector usaha yang terus diupayakan pengembangannya di daerah maupun secara nasional, karena lapangan usaha ini dapat dijadikan sumber pendapatan masyarakat dan daerah jika

mampu mengembangkan dan menciptakan daya tarik serta daya saing yang tinggi. Kota Padang memiliki objek wisata yang cukup bervariasi yaitu terdiri dari objek wisata alam, wisata sejarah, kepurbakalaan serta objek wisata bahari yang sangat menarik untuk dikunjungi. Perkembangan urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.44.

Tabel 2. 44
Perkembangan Indikator Layanan Urusan Pilihan Aspek Pariwisata
Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Objek	Unit	151	151	169	169	186
2	Kunjungan wisata						
	Mancanegara	Orang	47.002	47.609	139.119	53.057	54.967
	Domestik	Orang	1.823.40 1	2.252.33 6	2.965.80 7	3.001.30 6	3.199.39 2
	Jumlah	Orang	1.870.40 3	2.299.94 5	3.104.92 6	3.054.36 3	3.254.35 9
	Rata-rata kunjungan per objek wisata	Orang	12.387	15.231	18.372	18.073	17.497

Sumber: BPS Kota Padang, 2015

2.3.2.2 Pertanian

Keberhasilan pembangunan dan Pertambahan penduduk yang cukup pesat di Kota Padang mengakibatkan semakin berkurangnya luas lahan pertanian karena terjadinya alih fungsi lahan baik untuk kawasan permukiman maupun untuk peruntukan lainnya. Namun demikian masih dapat dicapai peningkatan produktivitas bahan pangan lokal seperti padi, jagung dan ubi jalar . perkembangan indikator urusan layanan ini ditampilkan pada tabel 2.45.

Tabel 2. 45
Perkembangan Indikator Layanan Urusan Pilihan Aspek Pertanian
Kota Padang Tahun 2010-2014

Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Produktivitas bahan pangan lokal per hektar						
Padi	Kw/ha	52,05	54,48	52,66	55,29	54,49
Jagung	Kw/ha	20	NA	25	NA	35
Ubi Kayu	Kw/ha	188,93	368,81	172,01	437,66	188,85
Ubi Jalar	Kw/ha	92,85	149,65	121,30	196,92	142,73
Kacang tanah	Kw/ha	13,51	12,86	22	17,5	8,33
Kedelai	Kw/ha	16	15	NA	10	10*

Sumber: BPS Kota Padang, 2015

2.3.2.2 Kehutanan

Sebagai kawasan perkotaan, kota Padang memiliki luas hutan yang terbatas, namun demikian urusan ini memegang peran penting dalam pelestarian lingkungan dalam upaya menjaga daya dukung lingkungan terhadap pembangunan daerah. Dari tabel 2.46 terlihat bahwa luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini harus mendapat perhatian lebih dalam pembangunan daerah di masa mendatang.

Tabel 2. 46
Perkembangan Indikator Kehutanan Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	107	75	20	300	317
2.	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	8000	6897	6897	6897	6580
3.	Rehabilitasi hutan lahan kritis	%	1,33	1,087	0,28	4,34	4,81
4.	Kerusakan kawasan hutan	%	12,13	16,39	18,89	18,89	18,02

Sumber: Dipernakbunhut Kota Padang, 2015

2.3.2.3 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Selama kurun waktu lima tahun terakhir persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ADHB menunjukkan tren peningkatan dari 1,69 persen pada tahun 2010 menjadi 3,43 pada tahun 2014.

Tabel 2. 47
Kontribusi sektor pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010*	2011*	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Pertambangan							
	ADH Berlaku	Milyar Rp	781,81	873,99	975,68	1.154,95	1,378,25	1.534,42
	ADH Konstan	Milyar Rp	781,81	816,53	853,17	926,57	982,98	1.039,29
2	Jumlah PDRB							
	ADH Berlaku	Milyar Rp	25.819,75	29.218,10	32.779,05	36.629,16	41.295,60	46.192,06
	ADH Konstan	Milyar Rp	25.819,75	27.427,38	29.115,68	31.054,50	33.094,95	35.258,57
3	Persentase Kontribusi sektor Pertambangan							
	ADH Berlaku	%	3,03	2,99	2,98	3,15	3,34	3,32
	ADH Konstan	%	3,03	2,98	2,93	2,98	2,97	2,95

Sumber: BPS Kota Padang, 2015

2.3.2.4 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan lapangan usaha ekonomi yang diharapkan terus tumbuh dan berkembang untuk mendukung kota sebagai pusat perdagangan di kawasan Sumatera Barat khususnya dan pulau Sumatera pada umumnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB maupun ADHK selama kurun waktu 2010 - 2014 menunjukkan tren peningkatan seperti yang diperlihatkan oleh pada tabel 2.48.

Tabel 2. 48
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010*	2011*	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan (Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor)							
	ADH Berlaku	Milyar Rp	4.619,61	5.179,16	5.781,00	6.318,89	6.869,65	7.489,07
	ADH Konstan	Milyar Rp	4.619,61	4.863,39	5.140,75	5.446,98	5.754,24	6.953,05
2	Jumlah PDRB							
	ADH Berlaku	Milyar Rp	25.819,75	29.218,10	32.779,05	36.629,16	41.295,60	46.192,06
	ADH Konstan	Milyar Rp	25.819,75	27.427,38	29.115,68	31.054,50	33.094,95	35.258,57
3	<i>Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor)</i>							
	ADH Berlaku	%	17,89	17,73	17,64	17,25	16,64	16,21
	ADH Konstan	%	17,89	17,73	17,66	17,54	17,39	17,17

Sumber: BPS Kota Padang, 2015 (Catt: Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran)

2.3.2.5 Perindustrian

Lapangan usaha industri kota Padang didominasi oleh industri kecil, dimana pertumbuhan unit usahanya jauh lebih besar dibandingkan industri menengah dan besar. Kondisi ini tentunya perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan agar lapangan usaha ini mampu terus tumbuh dan berkembang serta memberikan peran signifikan di dalam perekonomian daerah. perkembangan unit usaha industri dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2. 49
Pertumbuhan Unit Usaha Menurut Skala Usaha Industri
Di Kota Padang Pada Tahun 2010-2014

No	Jenis Industri	2010	2011	2012	2013	2014
1	Besar	10	24	27	27	27
2	Menengah	27	97	83	83	83
3	Kecil	140	3452	3503	3503	3605
	Jumlah	177	3573	3613	3613	3715

Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2015

Indikator yang menunjukkan perkembangan perindustrian di Kota Padang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Padang. Jika dibandingkan persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHK dan ADHB pada tahun 2010 dan 2015, menunjukkan peningkatan meskipun dalam kurun waktu tersebut terjadi fluktuasi kontribusi sektor tersebut. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 2.50:

Tabel 2. 50
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Kota Padang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perindustrian							
	ADH Berlaku	Milyar Rp	4.522,84	4.688,26	4.879,66	5.137,99	5.407,10	5.687,96
	ADH Konstan	Milyar Rp	4.522,84	4.688,26	4.879,66	5.137,99	5.407,10	5.687,96
2	Jumlah PDRB							
	ADH Berlaku	Milyar Rp	25.819,75	29.218,10	32.779,05	36.629,16	41.295,60	46.192,06
	ADH Konstan	Milyar Rp	25.819,75	27.427,38	29.115,68	31.054,50	33.094,95	35.258,57
3	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian							
	ADH Berlaku	%	17,52	17,52	16,93	16,31	15,90	15,61
	ADH Konstan	%	17,52	17,09	16,76	16,55	16,34	16,13

Sumber: BPS Kota Padang, 2015

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah Kab/ Kota lainnya yang berdekatan dengan daerah dalam hal ini antara lain adalah Kota Padang, persaingan dalam lingkup nasional atau internasional.

Kondisi Kota Padang terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Dari hasil data Suseda Kota Padang diperoleh besaran pengeluaran per kapita penduduk Kota Padang cukup bervariasi. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari penduduk Kota Padang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang paling dasar, sehingga rata-rata pengeluarannya relatif cukup rendah. Namun di lain pihak terdapat pula masyarakat yang mampu mengeluarkan dananya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan nilai yang cukup besar. Besaran rata-rata pengeluaran penduduk Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 22,07 % per tahun.

Tabel 2. 51

**Persentase Pengeluaran per Kapita Penduduk per Bulan
Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 2014 (dalam %)**

(1)	Golongan Pengeluaran (2)	Jenis Pengeluaran		Total (5)
		Makanan (3)	Bukan Makanan (4)	
1.	< 200.000	0,93	3,61	4,54
2.	200.000 – 299.999	4,24	6,13	10,38
3.	300.000 – 399.999	7,88	5,32	13,20
4.	400.999 – 499.999	6,35	4,81	13,71
5.	500.999 – 599.999	7,99	3,77	11,71
6.	600.999 – 699.999	5,43	3,13	8,57
7.	700.999 – 799.999	4,07	2,28	6,35
8.	> 800.000	11,20	20,90	32,09
	Padang	50,10	49,90	100,00

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Daerah

a. Aksesibilitas Daerah

Salah satu fasilitas penting dalam aktivitas ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur jalan. Kualitas jalan yang dirasakan sebagai

kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jalan yang baik akan mengurangi dampak biaya ekonomi tinggi. Jalan yang baik selain meningkatkan laju pertumbuhan lintas barang, jasa dan orang, juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Padang dalam memajukan infrastruktur di daerahnya.

b. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Berdasarkan data BPS, panjang jalan di Kota Padang mengalami penambahan yang signifikan pada tahun 2011, dimana panjang jalan bertambah sebesar 40,82 %, terutama jalan lokal sekunder. Sedangkan jalan primer, jalan sekunder serta lokal primer dan sekunder tidak terjadi penambahan. Peningkatan yang cukup dirasakan adalah meningkatnya panjang status jalan nasional dan jalan kota. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan dari semula di tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor 314.460 buah meningkat menjadi 966.965 buah di tahun 2011. Peningkatan yang sangat tinggi terutama terjadi pada kendaraan roda dua (sepeda motor) dan mini bus, hal ini diantaranya dipicu oleh sangat mudahnya fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor pada tahun ini.

Pertumbuhan panjang jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan tentunya akan menjadi masalah dalam transportasi kota khususnya dan mobilitas penduduk pada umumnya. Walaupun ada peningkatan dan penambahan panjang jalan pada tahun 2011, namun sampai dengan tahun 2013 belum ada penambahan panjang jalan. Akibatnya dengan jumlah kendaraan yang cenderung meningkat menyebabkan ternyadinya banyak simpul kemacetan kendaraan di kota Padang. Untuk itu diperlukan kebijakan pengendalian laju jumlah kendaraan dan kesadaran berlalu lintas masyarakat kota

Padang. Adapun perkembangan panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52
Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan dan Jumlah penduduk Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Panjang Jalan (Km)	1.642,42	2.312,80	2.312,80	2.312,80	2312.80
2	Jumlah Kendaraan	314.460	966.965	412.196	407.084	427.235
3	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan (m/unit)	5,22	2.39	5.61	5.68	5.41

Sumber: BPS Kota Padang 2015, data diolah

c. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

d. Fasilitas Bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. menurut fungsinya Bank dibagi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat sedangkan berdasarkan usahanya bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Pada tahun 2010 jumlah bank tercatat 81 buah, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 88 buah. Jika dilihat perkembangan jumlah bank mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2010 mencapai 266 buah baik berupa kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang maupun kantor cabang pembantu namun menurun drastis jumlahnya pada tahun berikutnya. Berdasarkan data terlihat bahwa perkembangan Bank syariah mulai meningkat meskipun menunjukkan perkembangan yang lambat.

Tabel 2. 53
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Padang
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Umum	81	84	266	88	88
2	Bank Konvensional	69	70	219	73	73
3	Bank Syariah	12	14	47	15	15

Sumber : BPS Kota Padang Tahun 2015 (Data Diolah)

e. Ketersediaan air bersih

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 sampai tahun 2012 kurang dari 50 persen rumah tangga yang menggunakan air bersih, namun jumlah ini meningkat menjadi 64 persen pada tahun 2013.

Tabel 2. 54
Persentase rumah tangga pengguna air bersih

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (%)	46,48	46,48	46,48	64	64

Sumber: PDA Kota Padang, 2015

f. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan hotel/penginapan.

Pada tahun 2010, Jumlah hotel dan restoran sebanyak 65 buah terdiri dari: hotel bintang 4 berjumlah 1 buah, hotel bintang 3 berjumlah 3 buah, hotel bintang 2 berjumlah 4 buah dan hotel bintang 1 berjumlah 3 buah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jumlah hotel maupun

jumlah kamar hotel mengalami peningkatan. Jumlah hotel maupun kamar hotel mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jumlah hotel pada tahun 2014 meningkat menjadi 110 buah dengan penambahan 1 hotel bintang 1 pada tahun 2012.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung pada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan lama proses perizinan dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung investasi.

a. Jumlah demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi selama periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demo adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Berdasarkan data, jumlah demonstrasi di Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Data tahun 2010, menunjukkan terdapat 75 kali demo, kemudian pada tahun 2011 menurun menjadi 69 kali. Selama kurun waktu 2012 sampai 2013, jumlah demosntrasi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan pada masa tersebut Kota Padang sedang mengalami masa transisi kepemimpinan kepala daerah. namun pada tahun 2014 jumlah demo menurun sampai hampir 50 persen.

Tabel 2. 55
Perkembangan Indikator Fokus Iklim Investasi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Kriminalitas (kasus)					2531
2	Jumlah Demo	75	69	83	152	73
3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (dalam juta Rp)					
A	Jumlah pajak daerah (dalam juta Rp)	77.639,34	102.412,4	118.364,9	128.595,1	156.230,0
B	Macam pajak daerah (macam)	7	9	10	11	11
C	Jumlah retribusi daerah (dalam juta Rp.)	25.651,52	22.712,65	27.440,6	36.943,5	53.196,6
D	Macam retribusi daerah (macam)	37	26	26	26	30

b. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi perkembangan jumlah pajak dan retribusi daerah yang masuk sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2010 jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pajak sebesar Rp. 77,64 Milyar meningkat dua kali lipat menjadi 156, 23 Milyar. Hal ini seiring dengan bertambahnya macam pajak yang dipungut oleh daerah.

Tabel 2. 56
Perda-perda terkait investasi di Kota Padang Tahun 2011 s.d 2015

No	Nomor Perda	Perda Tentang	Tanggal Ditetapkan
1	11 Tahun 2011	Retribusi Jasa Umum	22 Agustus 2011
2	12 Tahun 2011	Retribusi Jasa Usaha	22 Agustus 2011
3	13 Tahun 2011	Perda Retribusi Perizinan tertentu	22 Agustus 2011
4	3 Tahun 2012	Penanaman Modal	23 Mei 2012
5	4 Tahun 2015	Izin Usaha Jasa Konstruksi	9 Maret 2015

No	Nomor Perda	Perda Tentang	Tanggal Ditetapkan
6	6 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah	9 Maret 2015

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Padang, 2015

c. Kemudahan Perizinan

Untuk mempermudah iklim investasi, Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2010 s.d 2015 telah mengeluarkan sedikitnya 6 (enam) buah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung kemudahan investasi di Kota Padang. Salah satu perda tersebut adalah pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) melalui Perda Nomor 6 Tahun 2015. Penetapan BPMPTSP tersebut juga disertai dengan pelimpahan kewenangan walikota dibidang perizinan dan non perizinan yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Selain melalui penetapan kebijakan yang memberikan kemudahan investasi di Kota Padang, juga dilakukan peningkatan kualitas pelayanan BPMPTSP. Hal ini dapat dilihat dari lamanya proses pelayanan perizinan yang dikelola oleh Badan tersebut. Lamanya proses pelayanan perizinan pada BPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 57

Perizinan pada BPMPTSP menurut Jenis, Waktu dan Jumlah Persyaratan

Jenis izin	Dasar hukum	Waktu	Jumlah Persyaratan
Izin Usaha Angkutan IUI	PP NO.74 TAHUN 2014	14	8
	PP NO. 107 TAHUN 2014	14	10
TDG	PERMENDAG NO. 90 TAHUN 2014	10	7
SIUP	PERMENDAG NO. 46 TAHUN 2009	5	8
TDP	PERMENDAG NO.37 TAHUN 2007	5	7

Jenis izin	Dasar hukum	Waktu	Jumlah Persyaratan
Izin Gangguan	PERDA NO. 5 TAHUN 2016	15	9
IUJK	PERDA NO. 4 TAHUN 2015	14	8
Izin Trayek	PERDA NO. 74 TAHUN 2014	14	13
Tanda Daftar Usaha Pariwisata	PERDA NO. 5 TAHUN 2012	14	13
SIPU MB	PERDA NO. 8 TAHUN 2012	10	10

Sumber: BPMPTSP, 2016

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

SDM merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karena itu pembangunan SDM diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM. Kualitas SDM memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi daerah. Indikator dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja disuatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduk yang menyelesaikan pendidikan baik S1, S2 maupun S3. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio atau Tingkat ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih ditanggung oleh orangtua atau orang lain. Penduduk berusia 65 tahun keatas dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Depedency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting.

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 58
Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014 Kota Padang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk usia <15 tahun	227.220	241.006	232.723	231.129	233.387
2	Jumlah Penduduk usia >64 tahun	32.626	36.808	35.624	32.255	32.906
3	Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)	309.846	277.814	268.347	263.384	266.293
4	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	523.716	566.502	585.989	613.294	623.353
5	Rasio ketergantungan	59.16	49.04	45.79	42.95	42.72

Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2015(Data Diolah)

Berdasarkan tabel disimpulkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir rasio ketergantungan penduduk usia 0-4 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas menunjukkan tren penurunan. Dengan demikian beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi semakin rendah.